



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI



BALAI POM DI MANOKWARI

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

TAHUN ANGGARAN
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI MANOKWARI DAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	9
E. ISU STRATEGIS	11
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. VISI	17
B. MISI	19
C. BUDAYA ORGANISASI	26
D. TUJUAN	27
E. SASARAN KEGIATAN	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. CAPAIAN KINERJA	42
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA	49
C. REALISASI ANGGARAN	99
BAB IV PENUTUP	100
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga Balai POM di Manokwari senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Balai POM di Manokwari tahun 2021 triwulan IV.

Laporan Kinerja tahun 2021 triwulan IV merupakan media pertanggung jawaban Balai POM di Manokwari yang berisi informasi tentang pencapaian sasaran, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi permasalahan sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 triwulan IV, Balai POM di Manokwari selaku Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan produksi, melakukan pengujian sampel Obat dan Makanan, serta memberikan pelayanan melalui informasi dan komunikasi dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat. Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 triwulan IV memperoleh capaian kinerja dengan kategori baik (96.77%). Dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan, 9 (sembilan) sasaran kegiatan masuk dalam kategori nilai “baik” namun masih terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan dengan kategori nilai “cukup”.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja tahun 2021 triwulan IV, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan serta memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja yang jauh lebih baik bagi Balai POM di Manokwari.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Manokwari dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.

Manokwari, Januari 2022

Kepala Balai POM di Manokwari

The image shows a blue circular official stamp of the Balai POM di Manokwari. The outer ring of the stamp contains the text "BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN" at the top and "DI MANOKWARI" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp is a blue checkmark and the words "BADAN POM". A blue ink signature is written across the stamp, overlapping the central elements.

Musthofa Anwari, S.Si., Apt

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM dan perencanaan penugasan usulan Balai berdasarkan kondisi lingkungan strategis Balai POM di Manokwari serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Manokwari kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor

80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Dalam melaksanakan tugasnya di Provinsi Papua Barat, Badan POM memiliki 2 UPT yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong.

Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai

tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI MANOKWARI DAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari pre-market hingga post-market *control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Program*.

Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Guna mendukung pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat, laboratorium Balai POM di Manokwari telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium pengujian modern seperti *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS), Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, *Gas Chromatography* (GC), Spektrofotometer, *Thin Layer Chromatography* (TLC), Alat Disolusi, *Enzyme Linked Immunosorbent Assay* (ELISA) dan peralatan laboratorium lainnya. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Sorong menggunakan test kit untuk pengujian makanan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong selalu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan dan kemudahan akses terhadap produk obat dan makanan bagi masyarakat, serta kepentingan strategis lainnya yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151), Balai POM di Manokwari merupakan UPT dari Badan POM yang berkedudukan di Papua Barat. UPT Badan POM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

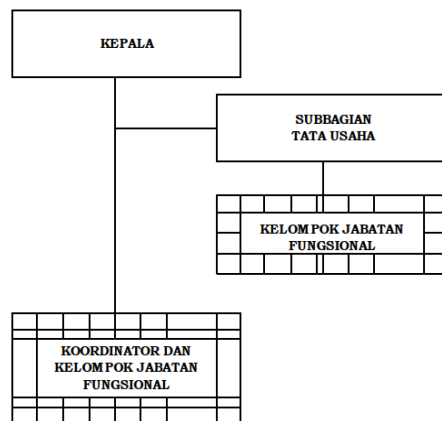
1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan untuk susunan organisasi Balai POM di Manokwari terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Balai POM di Manokwari sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan Organisasi Balai POM di Manokwari

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

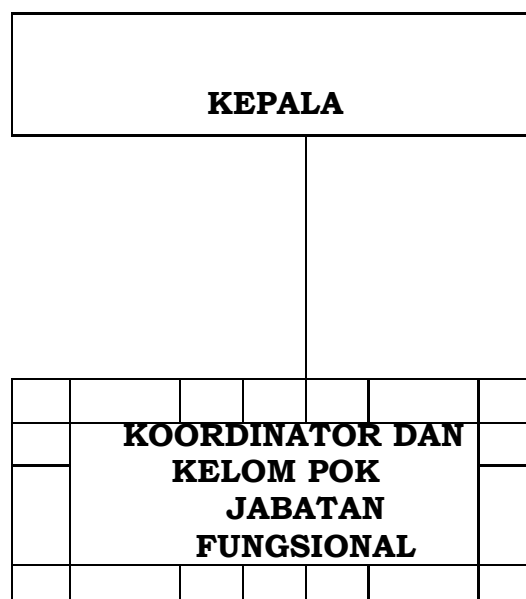
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Selain Balai POM di Manokwari, terdapat UPT Badan POM di Papua Barat, yakni Loka POM di Kabupaten Sorong. Susunan organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong terdiri dari:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan Organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Manokwari memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibagi di dalam UPT Balai dan Loka.

1) Pegawai Balai POM di Manokwari

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Manokwari untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Desember 2021 sejumlah 42 orang dengan proporsi 55% perempuan dan 45% laki – laki, sedangkan jumlah pegawai honorer termasuk CS dan satpam sebanyak 21 pegawai.

2) Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 13 pegawai PNS. Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, direkrut pramubakti sebanyak 2 orang, 2 Satpam dan 1 Supir.

b. Sumber Daya lainnya

Kantor Balai POM di Manokwari memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 9.142 m² dan luas bangunan 1752 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisa terkini. Balai POM di Manokwari memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai POM di Manokwari dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat untuk

Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari mencakup 8 Kabupaten sebagai berikut:

- a. Kabupaten Manokwari
- b. Kabupaten Raja Ampat
- c. Kabupaten Teluk Bintuni
- d. Kabupaten Teluk Wondama
- e. Kabupaten Fak-Fak
- f. Kabupaten Kaimana
- g. Kabupaten Pegunungan Arfak
- h. Kabupaten Manokwari Selatan

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong mencakup 4 kabupaten dan 1 wilayah kota sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sorong
- b. Kabupaten Sorong Selatan
- c. Kabupaten Tambrauw
- d. Kabupaten Maybrat
- e. Kota Sorong

E. ISU STRATEGIS

Beberapa Isu Stategis yang terjadi selama tahun 2021 triwulan IV, antara lain:

1. Pandemi Virus Covid-19

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Manokwari, antara lain disebabkan :

1. Pembatalan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan *sosial distancing* yaitu mengurangi

mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang.

2. Pemberlakuan sistem kerja *Work From Home* (WFH)

Berdasarkan SE dari Kepala Badan POM RI No. KP.11.01.2.24.03.20.21 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dimana penyelenggaraan kegiatan selama *pandemic* Covid-19 dibatasi antara lain :

- ✓ Beberapa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang menggerakkan massa dan bertatap muka ditunda dan dialihkan ke KIE online.
- ✓ Beberapa kegiatan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan serta penindakan dilakukan secara *desktop inspection* atau *desk audit* dan diprioritaskan melalui media online seperti skype, whatsapp, dll.

2. Pengawasan Obat dan Makanan

- a. Masih minimnya produk pangan hasil industri rumah tangga yang memiliki izin edar PIRT.

Dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat, hanya 4 (empat) Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan izin PIRT. Di sisi lain, terdapat produk pangan industri rumah tangga yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain: tepung sagu, abon ikan, kerupuk ikan, produk asinan dalam kemasan, selai buah, sirup pala, bakso, sari buah pala *ready to drink*, teh dalam kemasan *ready to drink*, minyak lintah, ekstrak buah merah, minyak daun tiga jari, dsb. Oleh karena itu, masih diperlukan pembinaan kepada UMKM dan koordinasi yang intens dengan lintas sektor yang terkait.

- b. Terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi di Papua Barat.

Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah. 2 (dua) di antara sekian banyak kekayaan alam tersebut adalah akar lawang dan minyak buah merah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan produk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Namun, terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi menjadi kendala pemenuhan persyaratan berkembangnya UKOT dan UMOT.

- c. Terbatasnya *supplier* reagen, media, gas, serta jasa pengiriman/ekspedisi di Papua Barat.

Ketersediaan kebutuhan mendasar laboratorium pengujian Balai POM di Manokwari sejauh ini belum tersedia secara lengkap di Papua Barat. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, barang harus didatangkan dari luar wilayah Papua Barat. Proses pengiriman barang dari luar Papua Barat memerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama. Selain itu, barang-barang yang dipesan sebagian besar datang tidak tepat waktu dan sebagian tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur dalam kontrak/pesanan. Hal-hal tersebut mempengaruhi kinerja pengujian di laboratorium Balai POM di Manokwari.

- d. Pengujian Laboratorium dalam mendukung UMKM

Upaya Balai POM di Manokwari dalam mendukung produk UMKM di Provinsi Papua Barat dengan membantu melakukan pengujian sampel produk yang didaftarkan. Pengujian dilakukan sesuai dengan parameter untuk pendaftaran produk tersebut. Sampel produk UMKM juga dimasukkan dalam sampling rutin agar membantu UMKM.

e. Pengujian Laboratorium untuk Kejadian Luar Biasa

Dalam mendukung layanan publik Balai POM di Manokwari. Kelompok Substansi Pengujian dan Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi Balai POM Manokwari siap saat terjadi kejadian luar biasa di hari libur. Pada tahun 2019 terdapat Kejadian Luar Biasa produk pangan dan segera ditindaklanjuti dengan dilakukan pengujian kimia saat itu juga dan terbit hasilnya. Pengujian mikrobiologi yang langsung dilakukan hari itu juga dan hasilnya juga langsung ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

3. Perdagangan Obat dan Makanan Secara *Online*

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang dapat dilakukan secara *online*. Pengawasan rutin Balai POM di Manokwari menunjukkan penjualan obat dan makanan secara *online* di Papua Barat meningkat pesat dan sebagian produk yang dijual adalah produk-produk tanpa izin edar.

3. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Balai POM di Manokwari dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan

a. Kemitraan dengan UMKM

Balai POM di Manokwari melakukan pembinaan UMKM dalam rangka membantu registrasi terutama untuk UMKM yang memerlukan bantuan teknis pengujian laboratorium. Balai POM di Manokwari memiliki program inovasi layanan yang mendukung UMKM yaitu “Inovasi Daun Bungkus (Inovasi Pendampingan UMKM Unggul dan Sukses)”.

b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Balai POM di Manokwari mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya *hoax* seputar obat dan makanan dalam masyarakat di Papua Barat.

4. Reformasi Birokrasi untuk Mencapai *Good Governance*

Balai POM di Manokwari berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 6 (enam) area perubahan. Telah dilakukan konsultasi ke Instansi Eksternal yang telah berpredikat WBK pada awal tahun, sebagai upaya untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas yang akan direview kembali oleh tim PMPRB di Inspektorat II. Dan pada akhirnya BPOM di Manokwari pada tahun 2021 telah mendapatkan predikat WBK.

5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Balai POM di Manokwari melakukan fungsi strategis dengan :

- a. Peningkatan sampling terhadap obat program JKN serta pengujian di laboratorium dalam rangka memantau mutu obat yang diproduksi.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian.
- c. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

Melalui upaya tersebut, diharapkan obat-obatan JKN di Provinsi Papua Barat aman untuk dikonsumsi.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai POM di Manokwari tahun 2021 triwulan IV dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi Balai POM di Manokwari
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan perencanaan dan Perjanjian Kinerja Balai POM di Manokwari Triwulan IV Tahun 2021.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Balai POM di Manokwari Triwulan IV Tahun 2021 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Balai POM di Manokwari Triwulan IV Tahun 2021 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- 1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah

semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

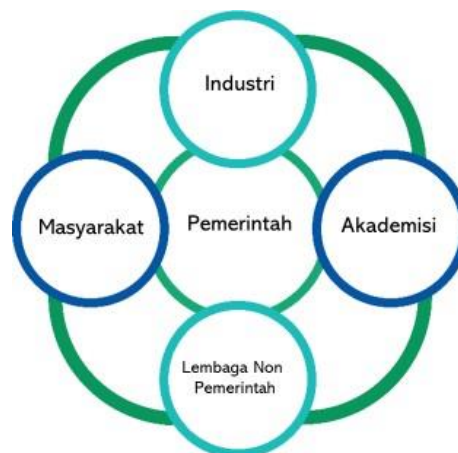
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman.

Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*.
- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

- 3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

b. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan

serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini, baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan

Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

D. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

E. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Manokwari. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
	memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari
		Nilai AKIP Balai POM di Manokwari
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Balai POM di Manokwari
SK 10	Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Manokwari yang optimal
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup Balai POM di Manokwari

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Balai POM di Manokwari tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat Provinsi Papua Barat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Manokwari merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* berupa audit sertifikasi sarana sebelum produk diberikan izin edar. Sedangkan pengawasan *post-market* terdiri dari: *Pertama*, pengawasan

setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Papua Barat, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten dan terstandar. *Kedua*, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. *Ketiga*, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 91% pada triwulan IV tahun 2021.
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 85% pada triwulan IV tahun 2021.

- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 92% pada triwulan IV tahun 2021.
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 84% pada triwulan IV tahun 2021.
- e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target 95% pada triwulan IV tahun 2021. Indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat merupakan indikator baru yang digunakan mulai triwulan IV tahun 2021 untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran kegiatan terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup Balai POM di Manokwari.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu terus dijalin kerjasama dengan semua pihak. Komunikasi, Informasi dan Edukasi terus ditingkatkan. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Balai POM di Manokwari bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai POM di Manokwari berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha

untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan *insentif*, *clearing house*, dan pendampingan *regulatory*.

Kerjasama Balai POM di Manokwari dengan lintas sektor telah dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.

Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Manokwari melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut:

Indeks kesadaran masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan target 82 pada tahun 2021.

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari

kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- a) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target 87.2 pada tahun 2021.
- b) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target 68.53 pada tahun 2021.
- c) Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari dengan target 99 pada tahun 2021.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Manokwari mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Manokwari, maka disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di sisi lain tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai visi misi Badan POM. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Manokwari mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Manokwari perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a) Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 95% di triwulan IV tahun 2021.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 35% di triwulan IV tahun 2021.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 99% di triwulan IV tahun 2021.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 50% di triwulan IV tahun 2021.

- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 60% di triwulan IV tahun 2021.
- f) Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari dengan target 4.45 pada tahun 2021.

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Pengukuran dari efektivitas KIE dengan indikator sebagai berikut:

- a) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 88.5 di triwulan IV tahun 2021.
- b) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 40 sekolah di tahun 2021.
- c) Jumlah desa pangan aman dengan target 8 desa di tahun 2021.
- d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 4 pasar di tahun 2021. Indikator ini mengalami perubahan nomenklatur mulai triwulan IV tahun 2021 dimana nomenklatur pada indikator awal adalah jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Balai POM di Manokwari merupakan UPT yang melakukan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya. Indikator meningkatnya pengujian obat dan makanan antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100% di triwulan IV tahun 2021.

- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100% di triwulan IV tahun 2021.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Balai POM di Manokwari selaku UPT di Provinsi Papua Barat harus bertanggung jawab akan keamanan obat dan makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah UPT maka balai POM di Manokwari dapat melakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dari efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan adalah:

- a) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 97% di triwulan IV tahun 2021.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal.

Sejalan dengan pengarus utamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM

berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks RB Balai POM di Manokwari dengan target 81 pada tahun 2021.
- b) Nilai AKIP Balai POM di Manokwari dengan target 76.2 pada tahun 2021.

9. Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan

Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks Profesionalitas ASN pada Balai POM di Manokwari dengan target 85 pada tahun 2021.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator dari menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan antara lain:

- a) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar dengan target 73 pada tahun 2021.
- b) Indeks pengelola data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal dengan target nilai 2 di triwulan IV tahun 2021.

11. Terkelolanya keuangan Balai POM di Manokwari secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah :

- a) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari dengan target nilai 93.6 di triwulan IV tahun 2021.
- b) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari dengan target efisien (95%) di triwulan IV tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja triwulan IV merupakan pengukuran kinerja periode terakhir pada tahun 2021. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2021. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Target sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2021 triwulan IV

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	85
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	82
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87.2
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.53
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari	99
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	35
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	4.45
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	88.5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	8
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari	81
		Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	76.2
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai POM di Manokwari	85

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW IV
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawsan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	73
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Manokwari yang optimal	2
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	93.6
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	Efisien (95%)

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2021 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria indikator

KRITERIA	% CAPAIAN
SANGAT BAIK	$110\% \leq x \leq 120\%$
BAIK	$90\% \leq x < 110\%$
CUKUP	$70\% \leq x < 90\%$
KURANG	$50\% \leq x < 70\%$
SANGAT KURANG	$x < 50\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian sasaran kegiatan Balai POM di Manokwari tahun 2021 triwulan IV tersaji dalam tabel berikut :

Capaian Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN SASARAN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	89.86	Cukup
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari	91.79	Baik
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari	93.54	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Manokwari	108.87	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	102.45	Baik
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	91.52	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari	103.09	Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	99.59	Baik
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	99.96	Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	84.06	Cukup
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	99.69	Baik
Rata-rata		96.77	Baik

Capaian kinerja Balai POM di Manokwari berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Balai POM di Manokwari Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	(T) TW IV	(R) TW IV	(C) TW IV	Kriteria
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase obat yang memenuhi syarat	91	84.21	92.54%	Baik
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	85	78.86	92.78%	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	79.78	86.72%	Cukup
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	78.18	93.07%	Baik
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	80	84.21%	Cukup
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	82	75.27	91.79%	Baik
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87.2	75.8	86.93%	Cukup
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.53	68.87	100.50%	Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari	99	92.28	93.21%	Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	(T) TW IV	(R) TW IV	(C) TW IV	Kriteria
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	94.53	99.51%	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	35	43.71	124.89%	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	97.16	98.14%	Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	53.52	107.04%	Baik
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	78.79	131.32%	Tidak dapat disimpulkan
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	4.45	4.11	92.36%	Baik
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	88.5	97.19	109.82%	Baik
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100.00%	Baik
		Jumlah desa pangan aman	8	8	100.00%	Baik
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	4	100.00%	Baik
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	85.27	85.27%	Cukup
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	97.76	97.76%	Baik
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97	100	103.09%	Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	(T) TW IV	(R) TW IV	(C) TW IV	Kriteria
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari	81	81.02	100.02%	Baik
		Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	76.2	75.56	99.16%	Baik
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Balai POM di Manokwari	85	84.97	99.96%	Baik
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	73	67.98	93.12%	Baik
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Manokwari yang optimal	2	1.5	75.00%	Cukup
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	93.6	88.09	94.11%	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	Efisien (95%)	Efisien (100%)	105.26%	Baik

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 84.21% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Papua Barat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase obat yang memenuhi syarat	91%	84.21%	92.54%	Baik

Pada tahun 2021 triwulan IV, capaian persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari sebesar 92.54%. Nilai persentase ini diperoleh dari 494 sampel Obat yang diperiksa dan diuji terdapat 416 sampel Obat yang memenuhi syarat.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan III

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III yakni tetap mengintensifkan pengawasan Obat dan Makanan di Papua Barat, melakukan intensifikasi terkait koordinasi dengan lintas sektor serta melakukan patroli siber dan inteligen. Semua rekomendasi perbaikan yang diberikan pada triwulan III telah dilakukan tindak lanjut pada triwulan IV.

Langkah yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan pencapaian indikator “Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari” yakni pengujian sampel produk Obat telah dilaksanakan dengan baik.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2022 yakni pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sampel tetap dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Arahkan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja antara lain perencanaan harus dilakukan dengan baik dari awal tahun agar tidak ada sampel *carry over* serta harus selalu ada pemeriksaan dan pengujian sampel untuk semua bulan.

1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 78.86% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Papua Barat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase makanan yang memenuhi syarat	85%	78.86%	92.78%	Baik

Capaian kinerja pada indikator persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 triwulan IV sebesar 92.78%. Pada hasil pengujian sampel Makanan sebanyak 123 sampel Makanan, terdapat 97 sampel Makanan yang memenuhi syarat. Dari hasil perhitungan maka diperoleh capaian kinerja dalam kategori “baik”.

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III yakni tetap mengintensifkan pengawasan Obat dan Makanan di Papua Barat, melakukan intensifikasi terkait koordinasi dengan lintas sektor serta melakukan patroli siber dan inteligen. Semua rekomendasi perbaikan yang diberikan pada triwulan III telah dilakukan tindak lanjut pada triwulan IV.

Langkah yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan pencapaian indikator “Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari” yakni pengujian sampel produk Obat telah dilaksanakan dengan baik.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2022 yakni pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sampel tetap dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja antara lain perencanaan harus dilakukan dengan baik dari awal tahun agar tidak ada sampel *carry over* serta harus selalu ada pemeriksaan dan pengujian sampel untuk semua bulan.

1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 79.78% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92%	79.78%	86.72%	Cukup

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 triwulan IV sebesar 86.72%. Nilai persentase ini diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 183 sampel yang mana hasil sampel memenuhi syarat sebanyak 146 sampel. Hasil capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan masuk dalam kategori cukup.

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III yakni tetap mengintensifkan pengawasan Obat dan Makanan di Papua Barat, melakukan

intensifikasi terkait koordinasi dengan lintas sektor serta melakukan patroli siber dan inteligen. Semua rekomendasi perbaikan yang diberikan pada triwulan III telah dilakukan tindak lanjut pada triwulan IV. Namun capaian pada triwulan IV masuk dalam kategori cukup hal ini disebabkan karena hasil pemeriksaan sampel Obat masih terdapat sampel yang TMS penandaan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja antara lain pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sampel tetap dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja adalah harus dilakukan koordinasi dengan pusat untuk hasil tindak lanjut yang TMS. Diharapkan hasil temuan dari Balai POM di Manokwari dapat ditindaklanjuti pusat ke para pelaku usaha/perusahaan, dengan menembuskan hasil tindak lanjutnya ke Balai, sehingga ke depannya tidak akan menjadi temuan yang berulang.

1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 78.17% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan				

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 triwulan IV sebesar 93.07%. Nilai persentase ini diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 55 sampel yang mana hasil sampel memenuhi syarat sebanyak 46 sampel. Hasil capaian indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan masuk dalam kategori baik.

Rekomendasi perbaikan capaian pada triwulan III yakni tetap mengintensifkan pengawasan Obat dan Makanan di Papua Barat, melakukan intensifikasi terkait koordinasi dengan lintas sektor serta melakukan patroli siber dan inteligen. Semua rekomendasi perbaikan yang diberikan pada triwulan III telah dilakukan tindak lanjut pada triwulan IV. Balai POM di Manokwari pada triwulan IV melakukan pengawasan produk dengan baik sehingga mampu menghasilkan capain kinerja dalam kategori baik pada akhir tahun.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk perbaikan tahun 2022 adalah pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sampel tetap dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Arahkan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbiki kinerja antara lain perencanaan harus dilakukan dengan baik dari awal tahun agar tidak ada sampel *carry over* serta harus selalu ada pemeriksaan dan pengujian sampel untuk semua bulan.

1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” dengan realisasi sebesar 80% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pangan fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Pangan fortifikasi yang MS}}{\text{Total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	80	84.21%	Cukup

Realisasi kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021 triwulan IV sebesar 80%. Nilai persentase ini diperoleh dari jumlah sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji sebanyak 70 sampel yang mana hasil sampel memenuhi syarat sebanyak 56 sampel. Hasil capaian indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat masuk dalam kategori cukup.

Belum tercapainya target kinerja dikarenakan terdapat hasil uji TMS (kadar KIO3 di bawah persyaratan) pada sampel fortifikasi garam yang mempengaruhi nilai kinerja. Upaya perbaikan dan arahan pimpinan yang perlu dilakukan untuk perbaikan tahun 2022 adalah harus berkordinasi dengan pusat agar segera melakukan tindak lanjut terhadap pelaku usaha/perusahaan produk TMS tersebut, dengan menembuskan hasil tindak lanjutnya ke Balai, sehingga ke depannya tidak akan menjadi temuan yang berulang.

2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang dicapai Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 sebesar 75.27.

Dalam penilaian Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdapat beberapa aspek yang dijadikan tolak ukur penilaian yakni:

- a) Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta

mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- b) Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- c) Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	82%	75.27%	91.79%	Baik

Dalam pengukuran indeks ini terdapat 3 indikator yang mempengaruhi yakni Indeks Kepatuhan Masyarakat, Indeks Sikap Masyarakat serta Indeks Perilaku Masyarakat yang mana nilai indeks Provinsi Papua Barat masih berada dibawah rata-rata nasional sehingga mempengaruhi pencapaian target yang belum tercapai karena pengetahuan masyarakat terkait produk OT dan SK yang

masih rendah, sikap masyarakat dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang belum baik. Upaya perbaikan yang akan dilakukan Balai POM di Manokwari dalam peningkatan capaian indikator adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan indeks pengetahuan khususnya pada peningkatan pengetahuan masyarakat terkait produk OT dan SK
2. Peningkatan indeks sikap masyarakat dengan cara melakukan edukasi ke masyarakat lebih masif agar masyarakat dapat bersikap lebih bijak dalam memilih/membeli/mengkonsumsi Obat dan Makanan.
3. Peningkatan indeks perilaku masyarakat dengan cara melakukan edukasi ke masyarakat lebih masif agar masyarakat dapat bersikap lebih bijak dalam memilih/membeli/mengkonsumsi Obat dan Makanan. Serta perlu intervensi yang tepat agar masyarakat mau mengubah perilaku dalam memilih Obat dan Makanan melalui edukasi persuasif kepada masyarakat.

Oleh karena hal tersebut pimpinan memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan agar melihat nilai indeks yang masih kecil untuk menjadi prioritas perbaikan.

3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing

bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87.2	75.8	86.93%	Cukup

Capaian kinerja indikator sebesar 86.93% dengan kategori capaian kinerja cukup. Dari empat kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan belum ada yang memperoleh nilai maksimal, antara lain :

1. Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan di Manokwari dan Sorong nilai kepuasan 73.11.
2. Pelatihan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) di Kab.Manokwari Selatan nilai kepuasan 66.67.
3. Pembahasan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) Hasil Pemeriksaan nilai kepuasan 85.46.
4. Sosialisasi dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan oleh Balai POM di Manokwari nilai kepuasan 78.08.

Untuk mengantisipasi tidak tercapainya lagi capaian indikator pada tahun 2022 maka perlu dilakukan pemetaan terkait masukan dan saran untuk

perbaikan dan akan dilakukan tindak lanjut perbaikan. Selain hal tersebut arahan dari pimpinan terkait perbaikan kinerja adalah peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan mencermati dan menindaklanjuti masukan dan keluhan dari para pelaku usaha yang ada pada data saran/masukan, diantaranya terkait dengan kemudahan memperoleh informasi kegiatan, jumlah peserta, media yang digunakan, kesiapan panitia, respon petugas/narasumber atas pertanyaan pelaku usaha, kecukupan waktu, mekanisme antrian untuk konsultasi dan sebagainya.

3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- a) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan
Obat dan Makanan**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.53	68.87	100.50%	Baik

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 100.50% dengan kategori capaian kinerja Baik. Pada penilaian indikator ini Balai POM di Manokwari telah mencapai aspek *responsiveness* (tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat) dengan baik, hal ini terbukti dengan tindakan BPOM di Manokwari melakukan penarikan produk TIE dan kadaluarsa , sehingga pada aspek tersebut memperoleh nilai diatas rata-rata nasional. Namun masih perlu adanya perbaikan berupa peningkatan aspek *reability* (kepuasan atas upaya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari), *assurance* dan *emphaty* (perhatian Balai POM di Manokwari terhadap jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat) karena nilai di Papua Barat masih lebih rendah dari rata-rata nasional. Oleh karena hal tersebut maka pimpinan memberikan arahan berupa rekomendasi perbaikan untuk semua fungsi yang melakukan pelayanan publik maupun pengawasan peredaran Obat dan Makanan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	99	92.28	93.21%	Baik

Pada tahun 2021 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebesar 92.28, target yang ditetapkan oleh Balai POM di Manokwari tidak dapat tercapai, hal ini dikarenakan tidak dapat dilakukan survei secara optimal karena beberapa masyarakat tidak terlalu *update* teknologi sehingga pelaksanaan survei tidak dapat menggunakan *link* selain hal itu perlu dilakukan perbaikan untuk peningkatan nilai dengan cara meningkatkan kualitas

pelayanan baik dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai POM di Manokwari dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pengoptimalan layanan.

4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 94.53%.

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95%	94.53%	99.51%	Baik

Pada tahun 2021 triwulan IV, terdapat 386 jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Manokwari, dan sebanyak 363 rekomendasi telah ditindak lanjuti sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan sebesar 94.53%. Presentase capaian target pada indikator keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 triwulan IV masuk dalam kategori “baik”.

Rekomendasi perbaikan capaian triwulan III yakni akan diintensifkan permintaan perbaikan melalui CAPA, melanjutkan pemeriksaan apabila belum melakukan perbaikan melalui CAPA dan jika dalam pemeriksaan berulang masih dilakukan temuan yang sama, maka tindak lanjut dinaikkan serta dilakukan pendampingan pembuatan perbaikan CAPA melalui Sosialisasi CAPA.

Kegiatan atau rekomendasi perbaikan telah dilakukan pada triwulan IV sehingga capaian kinerja masuk dalam kategori baik.

Keberhasilan pencapaian indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” pada triwulan IV dikarenakan intensifikasi permintaan perbaikan melalui CAPA telah berjalan maksimal dan pendampingan pembuatan perbaikan CAPA melalui Sosialisasi CAPA telah terlaksana dengan baik sehingga tindaklanjut temuan dapat dilaksanakan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja, Balai POM di Manokwari akan tetap melakukan pendampingan pembuatan perbaikan temuan melalui sosialisasi CAPA, sehingga mampu meningkatkan pemahaman stakeholder. Arahan pimpinan dalam rangka perbaikan kinerja antara lain tetap dilakukan monitoring berkala pada tahun 2022 mulai Januari, serta dilakukan koordinasi antara balai dan pusat terkait rekomendasi tindaklanjut temuan.

4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 43.71%.

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	35%	43.71%	124.89%	Tidak dapat disimpulkan

Pada tahun 2021 triwulan IV, terdapat 516 jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Manokwari, dan sebanyak 266 rekomendasi telah ditindaklanjuti sehingga persentase tindaklanjut yang dilaksanakan sebesar 43.71%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2021 triwulan IV masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan”, hal ini merupakan hasil dari rekomendasi triwulan III yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2021 berupa pengintensifkan koordinasi dengan stakeholder yang dapat memaksimalkan tindak lanjut yang diberikan oleh stakeholder. Pada triwulan IV *stakeholder* terkait merespon rekomendasi Tindak Lanjut yang diberikan oleh Balai POM di Manokwari pada bulan terakhir yang mempengaruhi tingginya capaian tindak lanjut oleh *stakeholder*. Oleh karena hal tersebut maka perlu mempertahankan koordinasi dengan *stakeholder* terkait agar tindak lanjut pada tahun 2022 tetap tercapai. Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan capaian kinerja adalah rekomendasi temuan tetap disampaikan ke *stakeholder* serta melakukan evaluasi tindaklanjut yang diberikan untuk menghindari temuan berulang.

4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan realisasi sebesar 97.16%. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indicator :

Persentase Keputusan Penyelesaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99%	97.16%	98.14%	Baik

Capaian kinerja pada indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu masuk dalam kategori baik dengan persentase capaian sebesar 98.14%. Pada tahun 2021 terdapat 175 pemohon sertifikasi yang mana sebanyak 171 permohonan sertifikasi telah diselesaikan tepat waktu oleh Balai POM di Manokwari. Pada triwulan III terdapat rekomendasi perbaikan berupa pelaksanaan kegiatan terkait intensifikasi pendampingan dan penilaian sarana sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan pada triwulan IV, sehingga pada akhir periode penilaian mampu memperoleh capaian baik. Namun pada tahun 2021 masih terdapat kendala sehingga belum maksimal dalam pencapaian kinerja antara lain disebabkan karena masih terdapat sarana yang belum melaksanakan perbaikan temuan sesuai dengan standar CPPOB/CPOTB sehingga tidak bisa diterbitkan sertifikatnya, oleh karena hal tersebut maka pada tahun 2022 akan dilakukan pendampingan yang lebih intens agar semua permohonan dapat diselesaikan tepat waktu. Arahan pimpinan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yakni perlu dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha dengan menerapkan pelayanan publik yang baik.

4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 53.52%. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator :

Persentase Sarana Produksi OMKA yang MK di Balai POM Manokwari

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	53.52%	107.04%	Baik

Pada tahun 2021 triwulan IV terdapat 71 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 38 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 53.32%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 triwulan IV, persentase capaian kinerja sebesar 107.04% dengan kategori capaian “baik”.

Balai POM di Manokwari memberikan rekomendasi perbaikan pada triwulan III berupa intensifikasi pembinaan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan, hal tersebut telah dilakukan tindak lanjut sehingga pada triwulan IV mampu meningkatkan capaian kinerja dari kategori cukup di triwulan III menjadi baik di triwulan IV. Secara keseluruhan pada tahun 2021 telah dilakukan

pembinaan terhadap sarana agar tetap komitmen menjaga mutu dan keamanan produk. Pada tahun 2022 dalam rangka pengawasan sarana akan dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Arahan pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan adalah perluasan jangkauan pengawasan sarana untuk pelayanan yang lebih baik.

4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 78.79%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100%.

Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	78.79%	131.32%	Tidak dapat disimpulkan

Pada tahun 2021 triwulan IV terdapat 693 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 546 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 78.79%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 triwulan IV, persentase capaian kinerja sebesar 131.32% dengan kategori capaian “tidak dapat disimpulkan”.

Balai POM di Manokwari memberikan rekomendasi perbaikan pada triwulan III berupa intensifikasi pembinaan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan, hal tersebut telah dilakukan tindak lanjut sehingga pada triwulan IV mampu meningkatkan realisasi kinerja. Pada tahun 2021 karena adanya intensifikasi vaksin di puskesmas yang mana menjadi program pendampingan terhadap puskesmas dalam pengelolaan vaksin terutama vaksin covid, sehingga persentase yang memenuhi ketentuan melebihi target. Pada tahun 2022 dalam rangka pengawasan sarana akan dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Arahan pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan adalah perluasan jangkauan pengawasan sarana untuk pelayanan yang lebih baik.

4.6 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BPOM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	4.45	4.11	92.36%	Baik

Pada tahun 2021 nilai Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari adalah 4.11 yang berarti target kinerja belum dapat dicapai. Hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya pemotongan anggaran sehingga tidak bisa memenuhi standar sarana dan prasarana yang ditetapkan.
2. Adanya Pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan hambatan komunikasi terkait layanan publik.
3. Keterbatasan akses internet di Provinsi Papua Barat sehingga penyebaran informasi ke publik kurang maksimal.
4. Kompetensi staf Infokom masih perlu ditingkatkan karena pegawai di Infokom adalah staf baru.
5. Peningkatan standar penilaian dimana pada tahun 2021 dilakukan penilaian berdasarkan maturitas tetapi belum ada persamaan persepsi penilaian maturitas dengan kompetensi petugas pelayanan publik.

Oleh karena hal tersebut maka hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja adalah :

1. Pemenuhan standar sarana dan prasarana di awal tahun;
2. Meningkatkan layanan publik secara online dengan inovasi 247;
3. Meningkatkan penyebaran materi layanan publik berbentuk hardcopy terutama untuk daerah yang belum memiliki akses jaringan internet;
4. Peningkatan kompetensi staf pelayanan publik terkait pelayanan prima dan maturitas penilaian pelayanan publik.

5.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Target kinerja pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” sebesar 88.50 pada tahun 2021 triwulan IV.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2021 triwulan IV adalah sebagai berikut ini :

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	88.5	97.19	109.82%	Baik

Capaian kinerja terkait indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing lingkup Balai POM di Manokwari berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan (HDSP) pada tahun 2021 dimana penilaian dilakukan per triwulan. Capaian indeks merupakan penggabungan antara capaian Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong. Capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2021 masuk dalam kategori “baik” dengan persentase capaian kinerja sebesar 109.82%.

Pada triwulan III Balai POM di Manokwari memberikan rekomendasi terkait pencarian bahan materi KIE terupdate sesuai dengan informasi yang di

butuhkan masyarakat saat ini dan telah dilaksanakan pada triwulan IV sehingga mampu menghasilkan capaian kinerja yang baik. Penyampaian materi disesuaikan dengan kearifan lokal serta disesuaikan dengan masyarakat dan topik yg sedang beredar di wilayah setempat merupakan strategi dalam pencapaian kinerja Balai POM di Manokwari. Namun masih terdapat kendala terkait jaringan internet yg tidak lancar di beberapa daerah di Provinsi Papua Barat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan KIE metode daring atau melalui media sosial. Rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 adalah pemberian materi yang *update* baik berupa *Power Point*, video, atau media yang lain. Arahan pimpinan dalam pelaksanaan KIE adalah penyesuaian metode pemberian KIE sesuai dengan karakter dan *local wisdom* yang ada.

5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Indikator Kinerja selanjutnya adalah “Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman” dengan target sebanyak 40 sekolah pada tahun 2021. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Realisasi triwulanan IV pada indikator ini dihitung berdasarkan progress tahapan, berikut capaian kinerja pada tahun 2021 triwulan IV :

Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40	40	100.00%	Baik

Tahapan kegiatan pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman antara lain adalah:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	5,00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)	
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15,00
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2021)	20,00
Total skor		100

Pada tahun 2021 triwulan IV tahapan kegiatan yang dilakukan sudah mencapai persentase tahapan pada angka 100% yang berarti target telah tercapai yakni 40 sekolah.

Pada triwulan III rekomendasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yakni mengevaluasi capaian dan disesuaikan target jadwal dari pusat untuk kegiatan di triwulan IV, hal itu telah ditindaklanjuti pada triwulan ke IV sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan pada akhir tahun.

Jumlah sekolah yang diintervensi pada tahun 2021 sebanyak 50 sekolah yang tersebar di tiga kabupaten (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan dan Kab. Bintuni) dengan 3 kategori intervensi yaitu : Intervensi A sebanyak 36 sekolah, Intervensi B sebanyak 4 sekolah (sekolah pengawalan di Kab. Manokwari) dan Intervensi C sebanyak 10 sekolah. Semua tahapan PJAS di 50 sekolah tersebut tercapai sesuai target dan timeline. Kendala/hambatan yang dihadapi antara lain : penetapan PPKM Level 4 pada pertengahan tahun 2021 menyulitkan pelaksanaan kegiatan secara luring, baik sosialisasi, bimtek, pemberian paket edukasi maupun monev pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah. Selain itu beberapa sekolah di 3 kabupaten yang diintervensi memiliki keterbatasan jaringan internet yang stabil, bahkan tidak tersedia sama sekali, sehingga pelaksanaan kegiatan secara daring tidak memungkinkan. Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain dapat dilakukan pemetaan kebutuhan materi yang disampaikan saat bimtek pada masing-masing jenjang sekolah, sehingga output yang diharapkan dapat optimal. Pengadaan paket edukasi yang disamakan untuk semua jenjang sekolah, menyebabkan ketidak efektifan dalam pencapaian tujuan, misalnya pemberian paket edukasi berupa permainan ular tangga untuk siswa Sekolah Menengah Atas. Kedepannya dapat dibedakan paket edukasi yang diberikan untuk sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas. Arahan dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu kegiatan Pro PN agar dilaksanakan mengacu pada KAK yang berlaku.

5.3 Jumlah desa pangan aman

Target kinerja pada indikator “Jumlah desa pangan aman” sebanyak 8 desa. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah

Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Jumlah desa pangan aman	8	8	100.00%	Baik

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progress (%)
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi	15,00
8	Pengawasan tahun sebelumnya	10,00
Total		100

Pada tahun 2021 triwulan IV kegiatan yang selesai dilakukan mencapai progress sebesar 100% yang berarti target jumlah desa pangan aman tercapai.

Pada triwulan III rekomendasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yakni mengevaluasi capaian dan disesuaikan target jadwal dari pusat untuk kegiatan di triwulan IV, hal itu telah ditindaklanjuti pada triwulan ke IV sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan pada akhir tahun.

Meskipun target tercapai namun masih ada kendala terkait pelaksanaan kegiatan, antara lain beberapa hambatan yang ditemukan dalam kegiatan GKPD yaitu beberapa wilayah tidak terdapat jaringan telepon dan internet sehingga menyulitkan koordinasi dengan tim KKPD setempat, kondisi pandemi sehingga pelaksanaan kegiatan GKPD dilaksanakan dengan beberapa batasan menyesuaikan kebijakan daerah masing-masing daerah. Untuk mengantisipasi adanya kendala yang akan muncul lagi, maka upaya perbaikan yang direkomendasikan adalah diharapkan ditahun 2022 pelaksanaan tahap awal bisa dilaksanakan diawal tahun, tidak seperti di tahun 2021 pelaksanaan tertunda hingga awal triwulan II karena ada perubahan DO. Arahkan dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu kegiatan Pro PN agar dilaksanakan mengacu pada KAK yang berlaku.

5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Target kinerja pada indikator “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” dengan target sebanyak 4 pasar. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas

sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Retail Pangan yang Baik (CRPB) oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	4	100.00%	Baik

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Advokasi	20,00
2	Survei Pasar	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00
5	Penyuluhan	5,00
6	Kampanye	5,00

7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00
8	Lomba Pasar Aman	10,00
	Total	100

Pada tahun 2021 triwulan IV kegiatan yang selesai dilakukan mencapai *progress* sebesar 100% yang berarti target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dapat tercapai. Pada triwulan III rekomendasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yakni mengevaluasi capaian dan disesuaikan target jadwal dari pusat untuk kegiatan di triwulan IV, hal itu telah ditindaklanjuti pada triwulan ke IV sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan pada akhir tahun.

Jumlah pasar yang diintervensi pada tahun 2021 sebanyak 3 pasar yaitu Pasar Sanggeng di Kab. Manokwari, Pasar Kenangan di Kab. Manokwari Selatan dan Pasar Air Tiba di Kab. Kaimana serta 1 pasar pengawalan yaitu Pasar Sumber Boga di Kab. Manokwari. Semua tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dapat diselesaikan sesuai target meskipun beberapa melewati timeline yang sudah ditetapkan pada KAK. Pasar Air Tiba Kaimana dipilih menjadi nominator Lomba Pasar tingkat Nasional yang akan diumumkan pada awal Februari 2022. Kendala yang dihadapi antara lain yakni situasi pandemi Covid-19 dengan penetapan PPKM level 4 di Provinsi Papua Barat menyebabkan jadwal beberapa tahapan tidak sesuai dengan perencanaan awal, akses transportasi di beberapa kabupaten di Papua Barat masih terbatas, salah satunya Kab. Kaimana dengan jadwal pesawat cuma 2 kali seminggu (Selasa dan Jumat) menjadi salah satu kendala pelaksanaan tahapan PPABK sesuai jadwal, dan akses internet di beberapa kabupaten tidak stabil, misalnya di Kabupaten Manokwari Selatan sehingga pelaksanaan kegiatan secara daring tidak memungkinkan, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana di tempat kegiatan yang menyulitkan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan secara luring.

Rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah:

1. Pelaksanaan Monev Tahap 1 dan 2 masih dirangkaikan dengan tahapan kegiatan yang lain karena petugas pasar/fasilitator yang telah dilatih belum dapat melakukan sampling dan pengujian secara mandiri karena belum memiliki test kit, ke depan agar diberikan test kit uji kimia bahan berbahaya pada tiap pasar yang diintervensi;
2. Koordinasi dengan Pemda/lintas sektor terkait, khususnya yang membawahi pasar agar lebih ditingkatkan untuk memudahkan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Arahan dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu kegiatan Pro PN agar dilaksanakan mengacu pada KAK yang berlaku.

6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Pada tahun 2021 jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 677 sampel, sampel Obat diuji sesuai standar sebanyak 473 sampel, jumlah target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun sebanyak 677 sampel sedangkan jumlah sampel masuk laboratorium 672 sampel. Dari hasil perhitungan diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 85.27%. Berikut merupakan tabel capaian indikator :

Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	85.27	85.27%	Cukup

Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam kategori cukup, hal ini disebabkan karena terdapatnya pengujian sampel OT dan SK yang tidak memenuhi timeline karena beberapa sebab antara lain : SDM pengujian yang baru membutuhkan waktu kepenyeliaan sebelum dapat mengerjakan sampel secara mandiri, kerusakan instrumen yang membutuhkan waktu untuk perbaikan, dan keterlambatan pengiriman reagen maupun gas yang dibutuhkan dalam proses pengujian, serta penetapan perencanaan sampling yang kurang efektif dan efisien.

Pada triwulan III terdapat rekomendasi terkait percepatan perbaikan TLC di laboratorium Obat Tradisional, serta melakukan tender pra DIPA untuk mengantisipasi keterlambatan pengadaan reagen. Namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan karena perbaikan alat yang membutuhkan sumber anggaran, anggaran diprioritaskan untuk perbaikan alat – alat tertentu yang dianggap lebih *urgent*. Untuk tender pra DIPA belum dapat terlaksana karena menunggu perencanaan sampling tahun 2022, sehingga perhitungan kebutuhan reagen dan media belum dapat terselesaikan di akhir tahun.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah melakukan pemeliharaan alat secara berkala untuk meminimalisir kerusakan serta perbaikan alat yang masih mengalami kerusakan, membuat perencanaan pengadaan yang lebih baik agar tidak ada lagi kekosongan stok reagen dan gas, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar, perlu memperbaiki perencanaan sampling agar lebih efektif dan efisien dalam waktu pengerjaan pengujian sampel OT dan Suplemen Kesehatan. Arahan pimpinan untuk perbaikan pengujian sesuai standar antara lain perbaikan alat agar segera dilakukan untuk menghindari keterlambatan pengujian sampel di tahun 2022.

6.2 Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standard dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Pada tahun 2021 jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 248 sampel, sampel Makanan diuji sesuai standard sebanyak 234 sampel, jumlah target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun sebanyak 248 sampel sedangkan jumlah sampel masuk laboratorium 245 sampel. Dari hasil perhitungan diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 97.76%. Berikut merupakan tabel capaian indikator :

Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	97.76	97.76%	Baik

Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard masuk dalam kategori baik, pencapaian ini karena pada tahun 2021 telah dilakukan pengawasan dan pengujian terhadap Makanan di Papua Barat dilakukan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian.

Pada triwulan III terdapat rekomendasi terkait pengajuan tender pra DIPA untuk mengantisipasi keterlambatan pengadaan baku pembanding. Untuk tender pra DIPA belum dapat terlaksana karena perencanaan kebutuhan belum terselesaikan. Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan

dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah membuat perencanaan pengadaan yang lebih baik agar tidak ada lagi keterlambatan datangnya baku, sehingga proses pengujian dapat berjalan sesuai timeline. Arahan pimpinan untuk perbaikan pengujian sesuai standar yakni ketika ada pemeriksaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan agar dilakukan tindaklanjut atau tembusan ke sarana, atau berkordinasi dengan pusat agar menindaklanjuti temuan balai ke pelaku usaha/pengusaha, untuk menghindari temuan berulang.

7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan inteligen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan

terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97	100	103.09%	Baik

Pencapaian indikator ini dapat dilihat dan dinilai dari kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan. Target perkara tahun 2021 sebanyak 4 perkara dimana 3 perkara target Balai dan 1 perkara target Loka POM. Realisasi pada triwulan IV sebesar 100% serta capaian kinerja sebesar 103.09% dan termasuk dalam kategori capaian yang baik.

Rekomendasi perbaikan kinerja di triwulan III akan dilakukan pengawalan terhadap perkara yang diperoleh untuk sampai pada tahap terakhir dan putusan pengadilan, semua rekomendasi telah dilakukan dan semua tahapan telah selesai pada tahun 2021. Keberhasilan pencapaian indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” yang masuk dalam kategori baik karena Balai POM di Manokwari telah melakukan:

1. Database pemeriksaan/*history* sebelumnya sehingga dapat dilakukan pemetaan untuk potensi kejahatan;
2. Database Hasil Kegiatan Intelijen/Operasi Intelijen;
3. Perkuatan Koordinasi dan Kerjasama antar *Criminal Justice System*;

4. Pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Upaya yang akan dilakukan agar mampu mempertahankan capaian di tahun 2022 yaitu akan tetap dilakukan perkuatan koordinasi CJS dan lintas sektor untuk sinergi pengawasan Obat dan Makanan di Papua Barat. Arahan pimpinan dalam perbaikan kinerja tahun 2022 adalah target tahun 2022 dapat dilaksanakan sampai tahap II, sehingga tidak ada *carry over*.

8.1 Indeks RB

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja yang memenuhi kriteria penilaian pada area manajemen perubahan, penguatan penataan tatalaksana, penguatan penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian WBK satker / unit kerja terdiri dari 2 komponen nilai, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Berikut adalah rincian bobot komponen pengungkit :

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penguatan Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penguatan Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Rincian bobot indikator adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Tabel capaian target kinerja pada indikator Indeks RB

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari	81	81.02	100.02%	Baik

Penilaian indeks RB Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 sebesar 81.02 dari target 81 sehingga capaian kinerja sebesar 100.02% dengan kategori capaian baik.

Berikut merupakan ringkasan pelaksanaan RB di Balai POM di Manokwari sehingga mampu mencapai target kinerja:

1. Pembangunan ZI di BPOM Manokwari telah dilakukan berdasarkan rencana kerja. Atas capaian rencana kerja telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan termasuk capaian target prioritas;
2. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari *Agent of Change* (AoC) bersama dengan Kepala Balai yang telah berperan sebagai *role model* perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi;
3. Peningkatan penataan Manajemen SDM telah dilaksanakan dengan adanya perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi internal, pengembangan kompetensi, penegakan aturan disiplin dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian;

4. Pimpinan terlibat dalam perencanaan kinerja dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Disamping itu pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh SDM yang kompeten;
5. Penguatan pengawasan telah dibangun dengan melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi, pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS), dan pengelolaan pengaduan;
6. Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong peningkatan integritas antara lain Inovasi Pelayanan Publik Siaga 247 (Pelayanan Publik dilakukan 24 jam sehari melalui Whatsapp, serta jadwal pelayanan kantor tetap buka di hari Sabtu, Minggu dan Hari Raya), Inovasi Jinar-One (Percepatan timeline pelayanan pengujian pihak ketiga khusus untuk sampel sabu-sabu dan ganja menjadi 1 HK dan 3 HK), Inovasi Daun Bungkus (Pendampingan UMKM Unggul dan Sukses), Inovasi Pentas Papeda (Pengawasan Fasilitas Sampai ke Pedalaman Papua Barat).

Namun dari beberapa point yang telah dilakukan masih perlu adanya perbaikan, antara lain:

1. Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI terlaksana sesuai rencana kerja dan belum terdapat justifikasi atas kegiatan yang belum terlaksana;
2. *Plan of action* AoC telah disusun dan dilaksanakan namun belum dilengkapi data dukung implementasi dari program AoC;
3. Telah dilaksanakan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi namun belum terdapat data dukung jika upaya tersebut mampu mengurangi resistensi atas perubahan;
4. Telah membangun inovasi dalam sistem kinerja namun inovasi berupa menampilkan capaian kinerja (E-Sukun) belum berupa inovasi dalam rangka sistem pengukuran kinerja;
5. BPOM di Manokwari telah mengembangkan inovasi pelayanan publik Siaga 247, Jinar One, Daun Bungkus, Pentas Papeda namun belum

terdapat data dukung yang memadai atas implementasi inovasi yang menggunakan teknologi informasi;

6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik namun belum terdapat data dukung telah dilaksanakan secara berkesinambungan;
7. Telah menyusun *Training Need Analysis* namun belum ditambahkan jenis pelatihan yang dibutuhkan setiap jabatan;
8. Telah menyusun pemetaan gap kompetensi namun belum dilakukan terhadap kompetensi manajerial;
9. Telah disusun cascading kinerja namun cascading indikator belum mencapai tingkat individu dan belum sesuai dengan PerMenPAN No 8 Tahun 2021;
10. Pimpinan unit kerja telah memantau pencapaian kinerja secara berkala namun belum terdapat data dukung bahwa hasil pemantauan telah ditindaklanjuti;
11. BPOM di Manokwari telah membangun lingkungan pengendalian namun belum mengembangkan inovasi sesuai karaktersik unit kerja;
12. Telah melakukan upaya penginformasian dan pengkomunikasian terkait SPI kepada seluruh pihak terkait, namun belum dilengkapi data dukung atas pengkomunikasian kepada stakeholder;
13. Telah menyusun laporan penanganan WBS secara berkala namun belum dilakukan evaluasi atas pelaporan nihil;
14. Sudah terdapat Standar Pelayanan dan SOP, namun belum terdapat data dukung menunjukkan unit kerja melakukan reviu atas Standar Pelayanan dan SOP;
15. BPOM di Manokwari telah menyusun standar pelayanan publik namun belum seluruhnya mengacu pada PerMenPAN Nomor 15 tahun 2014;
16. Atas pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat BPOM di Manokwari belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil SKM Tahun 2020;

17. Secara umum belum dilakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja, stakeholder dan masyarakat.

Rekomendasi perbaikan untuk peningkatan nilai RB pada tahun 2022 adalah:

1. Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan ZI secara berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL yang dihadapi untuk masing masing area perubahan dan menyusun justifikasi atas realisasi maupun capaian pelaksanaan kegiatan ZI yang tidak sesuai dengan rencana kerja;
2. Melakukan penambahan data dukung atas implementasi program AoC;
3. Agar menambahkan data dukung bahwa upaya pembangunan budaya kerja dan lingkungan organisasi mampu mengurangi resistensi atas perubahan;
4. Mengembangkan inovasi dalam pengukuran kinerja, pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi sebagai upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengukuran kinerja unit secara berkesinambungan;
6. Menyusun *Training Need Analysis* yang mencakup jenis pelatihan yang dibutuhkan setiap jabatan;
7. Menyusun *Training Need Analysis* yang mencakup jenis pelatihan yang dibutuhkan setiap jabatan;
8. Menyusun cascading indikator kinerja hingga tingkat individu sesuai dengan PerMenPAN No 8 Tahun 2021;
9. Melengkapi data dukung bahwa pimpinan unit kerja telah memantau tindak lanjut hasil monitoring capaian kinerja secara berkala;
10. Agar melengkapi data dukung terkait penginformasian dan pengkomunikasian terkait SPI kepada seluruh pihak terkait;
11. Menyusun laporan penanganan WBS dengan menambahkan evaluasi atas pelaporan nihil;

12. Melakukan penambahan data dukung berupa revidi atas Standar Pelayanan dan SOP;
13. Terus melakukan pengembangan dan penerapan inovasi, baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan *stakeholder* dan masyarakat disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja;
14. Melaksanakan *continues improvement* pada seluruh area Pembangunan ZI dalam rangka menuju WBK dan WBBM.

8.2 Nilai AKIP BPOM di Manokwari

Nilai Balai POM di Manokwari dinilai berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a) Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%) dan implementasi Renstra (3%)
 - b) Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b) Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c) Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b) Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b) Kualitas evaluasi (5%)
 - c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a) Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%)
 - b) Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%)
 - c) Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	76.2	75.56	99.16%	Baik

Penilaian AKIP Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

1. Rencana Strategis Balai POM di Manokwari periode 2020-2024 tujuan pada Renstra telah dilengkapi indikator dan selaras dengan sasaran strategis serta dipublikasikan pada website Badan POM;
2. Capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan digunakan untuk menyimpulkan atau memberikan predikat.
3. Implementasi mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai berupa pedoman atau SOP, SK tim penanggung jawab dan kemudahan penelusuran data.

4. Laporan Kinerja Interim menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan.
5. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk peningkatan nilai pada tahun 2022 maka perlu dilakukan :

1. Menetapkan target kinerja berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target, analisis mengenai kenaikan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi
2. Melengkapi Rencana Aksi atas kinerja dengan mencantumkan anggaran per level sasaran, indikator, sub kegiatan/komponen serta memonitornya.
3. Menyusun *cascading* indikator kinerja sampai dengan level individu yang selaras dengan indikator kinerja unit kerja/atasannya.
4. Menyajikan analisis kendala/keberhasilan capaian target, rencana aksi dan monitoring atas rencana aksi pada Laporan Kinerja Interim.
5. Memaksimalkan pemanfaatan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
6. Menyampaikan masukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyempurnaan aplikasi e-performance Badan POM agar dapat digunakan secara optimal dalam proses perencanaan kinerja sampai dengan capaian kinerja.
7. Menyempurnakan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja dengan membuat analisis tingkat efisiensi per kegiatan, pengukuran kinerja kegiatan, efisiensi per sasaran serta perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi target indikator kinerja dengan IKU Badan POM.
8. Menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja agar meminimalisir risiko kesalahan data kinerja serta menambahkan mekanisme apabila terjadi kesalahan data kinerja.

9. Memaksimalkan pemanfaatan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan perbaikan/peningkatan kinerja.
10. Menyempurnakan evaluasi internal berupa monitoring capaian kinerja yang dilengkapi dengan analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi.
11. Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.
12. Meningkatkan keandalan data kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan mampu telusur.

9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari

Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut :

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan

3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami

Penilaian indeks profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari dilakukan pada akhir tahun 2021, sehingga belum terdapat capaian pada triwulan III tahun 2021.

Realisasi Indikator Kinerja *output* Sasaran Kegiatan tahun 2021 triwulan IV disajikan dalam tabel berikut ini:

Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari	85	84,97	99,96	baik

Hasil capaian tersebut adalah nilai gabungan dari Balai dan Loka, dimana realisasi IP ASN Balai sebesar 84,58% dan Loka sebesar 85,36%. Kekurangan terdapat di dimensi kompetensi, dikarenakan pejabat struktural yang belum mengikuti diklat pimpinan sesuai tingkat eselon yang sesuai, dan pegawai CPNS yang belum mengikuti diklat fungsional, serta beberapa pegawai yang nilai kompetensi di bawah kriteria baik.

Untuk peningkatan nilai pada tahun 2022 maka perlu dilakukan pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial pegawai sesuai jenjang jabatan.

10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) Badan POM.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Penilaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 sebesar 67.98. Pada tahun 2021 target kinerja sebesar 73 sehingga target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai. Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain:

1. Ketersediaan sediaan Obat dan OTSK di Manokwari menyulitkan peningkatan SRL di laboratorium Obat.
2. Terdapat beberapa baku pembanding yang direncanakan untuk peningkatan SRL ternyata belum datang sampai akhir tahun sehingga perencanaan dialihkan untuk tahun 2022.
3. Adanya hambatan terkait kerusakan alat sehingga menghambat kinerja pengujian rutin maupun penambahan SRL.
4. Masih terdapat SDM (koordinator, penguji di laboratorium Obat, Kosmetik OTSK dan Pangan) yang belum memenuhi target secara individu karena sebagian SDM yang baru masuk ke kelompok substansi pengujian memerlukan waktu untuk meningkatkan kompetensi.
5. Adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan kegiatan magang tidak terlaksana.
6. Adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan pembatalan pembelian beberapa peralatan/ instrument (*vacuum manifold set* dan lemari reagen/ *chemical storage*).

Upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja tahun 2022 adalah :

1. Penambahan SRL dapat dilakukan melalui pembelian secara *online* terhadap sampel yang tidak dapat ditemukan di Papua Barat.

2. Melakukan pelatihan/BIMTEK/magang secara *online* atau *offline* untuk peningkatan kompetensi bekerja sama dengan P3OMN atau institusi lain yang sesuai.
3. Penyusunan rencana pembelian alat/instrument terhadap standar peralatan terbaru BPOM sehingga dapat memenuhi kebutuhan peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan.

10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi balai POM di Manokwari

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup :

- Balai : email, *sharing folder*, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

**Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM
Manokwari**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Manokwari	2	1.5	75.00%	Cukup

Nilai akhir indeks pengelolaan data dan informasi pada tahun 2021 adalah 1,5 dengan realisasi capaian kinerja 75% dan termasuk dalam kategori capaian yang cukup. Rekomendasi perbaikan pada triwulan III yang telah dibuat seperti pemanfaatan penggunaan *sharing folder* perlu ditingkatkan (pengguna pada kelompok substansi Pemeriksaan) peningkatan verifikasi akun SIKER (pada kelompok substansi Infokom), penggunaan *email corporate* untuk semua pegawai ditingkatkan, penginputan SIPT menjadi tanggung jawab pegawai yang masuk dalam SK, dan optimalisasi penggunaan sosial media pada subsite BPOM di Manokwari telah dilakukan namun hasil yang diperoleh belum maksimal pada triwulan IV. Belum tercapainya target kinerja ini dikarenakan kendala pencapaian pada triwulan I-III mempengaruhi hasil yang tidak maksimal meskipun pada triwulan IV terdapat peningkatan nilai rata-rata pemanfaatan dari aplikasi yang terjadi pada pemanfaatan BCC serta SPIMKER. Oleh karena hal tersebut maka perlu dilakukan optimalisasi penggunaan atau

pemanfaatan aplikasi mulai dari Januari agar tidak berimbas ke pencapaian kinerja pada akhir tahun.

11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	93.6	88.09	94.11%	Baik

Nilai EKA Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 triwulan IV sebesar 84.19 sedangkan nilai IKPA Balai POM di Monokwari sebesar 93.93. Hasil pembobotan 60% nilai EKA dan 40% nilai IKPA diperoleh nilai kinerja anggaran Balai POM di Manokwari sebesar 88.09. Target kinerja pada tahun 2021 triwulan IV sebesar 93.6 sehingga pada tahun 2021 target kinerja tidak dapat tercapai, namun kategori pencapaian kinerja masih masuk dalam kategori baik. Hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kinerja adalah belum maksimalnya nilai kesesuaian RPD dengan realisasi yang ada di Balai POM di Manokwari, masih terdapat kesalahan dalam pembuatan SPM, serta nilai pada komponen kontrak yang belum maksimal meskipun rekomendasi perbaikan di triwulan III telah dilakukan yakni pelaksanaan semua target output dilaksanakan serta pengelolaan keuangan dilakukan sesuai pedoman.

Upaya serta arahan pimpinan dalam pencapaian peningkatan kinerja tahun 2022 adalah pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan renlak kegiatan yang sudah ditetapkan pada PoA, pejabat PPSPM agar melaksanakan pemeriksaan SPM dengan lebih teliti untuk menghindari penolakan serta ketentuan kontrak yang berlaku agar dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan serta perlu dilakukan pemantauan ke semua indikator penentu nilai IKPA dan EKA untuk memaksimalkan penilaian pada periode berikutnya.

11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih

besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	95	100	105.26%	Baik

Capaian output balai pada tahun 2021 triwulan IV sebesar 106.62% sedangkan input yang digunakan sebesar 99.86% (berdasar perhitungan SAS), dari persentase output dan input yang telah terealisasi diperoleh nilai efisiensi anggaran sebesar 100%. Pada triwulan III Balai POM di Manokwari telah menjalankan rekomendasi perbaikan berupa pelaksanaan semua target output dilaksanakan serta pengelolaan keuangan dilakukan sesuai pedoman sehingga pada akhir tahun mampu mencapai target. Pada tahun 2021 triwulan IV Kegiatan Pro PN dan target rincian output pada tahun 2021 semua terlaksana dan tidak ada yang *carry over* pada tahun 2021. Rekomendasi dan arahan

pimpinan untuk mempertahankan kinerja yakni pelaksanaan kegiatan dan penganggaran diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mendapatkan hasil efisiensi yang maksimal.

C. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 triwulan IV sebesar Rp. 24.079.803.000, sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2021 triwulan IV adalah sebagai berikut.

1. Belanja pegawai Rp. 6.791.773.165
2. Belanja barang Rp. 10.042.542.877
3. Belanja modal Rp. 7.202.038.491

Total serapan anggaran tahun 2021 triwulan IV sebesar Rp. 24.036.354.533 (sumber OM SPAN per 31 Desember 2021).

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2021 triwulan IV, secara garis besar pencapaian kinerja Balai POM di Manokwari dinilai dari 11 sasaran yang ditetapkan. Pencapaian Balai POM di Manokwari antara lain sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) sasaran strategis dengan kategori baik, yaitu :
 - 1) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari.
 - 2) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari.
 - 3) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Manokwari.
 - 4) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari.
 - 5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari.
 - 6) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari.
 - 7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal.
 - 8) Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal.
 - 9) Terkelolanya keuangan Balai POM di Manokwari secara akuntabel.
2. 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori cukup yaitu:
 - 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari.

- 2) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Manokwari berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standard.
- 2) Peningkatan kreatifitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Papua Barat untuk peningkatan nilai indeks.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan laboratorium pengujian dalam rangka pemenuhan nilai GLP.
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 6) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 7) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 8) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di Balai POM di Manokwari akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Manokwari dapat terus meningkat pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BPOM di Manokwari
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musthofa Anwari, S.Si., Apt

Jabatan : Kepala Balai POM di Manokwari

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 08 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Musthofa Anwari, S.Si., Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BPOM di Manokwari

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	35
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87.2
10	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88.5
11	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.53
12	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	99
13	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
15	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	8
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	4
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
18	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.45
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	73
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97
23	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	76.2
26	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.6
27	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2
29	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

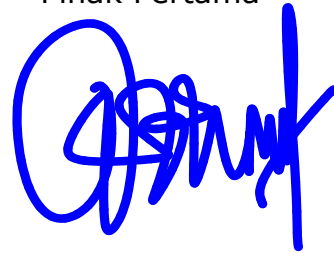
Rp.
24,079,803,000.00

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Manokwari, 08 Desember 2021

Pihak Pertama

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Musthofa Anwari', written over a faint circular stamp.

Musthofa Anwari, S.Si., Apt

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BPOM di Manokwari
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83.6			83.6			83.6	83.6	83.6	91	212.503.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			80			80			80	80	80	85	120.845.500, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			82			82			82	82	82	92	212.503.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			86			86			86	86	86	84	120.845.500, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat										95	95	95	79.611.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												82	31.025.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												87.2	106.377.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												68.53	246.440.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												99	336.093.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			89			89			89	89	89	95	16.412.500, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			37.5			37.5			37.5	37.5	37.5	35	16.412.500, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			88			88			88	88	88	99	165.114.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			55			55			55	55	55	50	94.033.500, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			63			63			63	63	63	60	894.121.500, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.45	451.178.000,00
16.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			85.1			85.1			85.1	85.1	85.1	88.5	142.372.000,00
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			15			20			55	55	55	40	568.657.000,00
18.	Jumlah desa pangan aman			20			35			75	75	75	8	843.287.000,00
19.	Jumlah pasar aman berbasis komunitas			20			25			60	60	60	4	137.481.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			20.75			41.5			62.25	62.25	62.25	100	392.180.500,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			22.5			45			67.5	67.5	67.5	100	392.180.500,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			14			15			20	20	20	97	698.860.000,00
23.	Indeks RB UPT												81	226.248.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												76.2	55.956.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85	680.958.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												73	5.940.345.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2			2			2	2	2	2	554.083.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			15			30			50	50	50	93.6	2.951.447.000,00
29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			95			95			95	95	95	95	7.392.233.000,00
Total														24.079.803.000,00

Manokwari, 08 Desember 2021

Kepala Balai POM di Manokwari

Musthofa Anwari, S.Si., Apt

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1

No	UPT	No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total													RAPK 2021	
							Jumlah sampli ng	TMK			TMK Label / Penand aan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji				Total TMS yang diperik sa	Belum selesai uji		Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)
								TIE/ ilegal/ Palsu	kedalua rsa	rusak				MS (MK penand aan dan MS uji lab) *	MK Penand aan dan TMS uji lab **	TMK Penand aan dan MS Uji Lab ***	TMK Penand aan dan TMS uji lab ****				
30	Manokwari	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																			
		1	Obat	Manokwari	29	Targeted	29	0	0	0	4	29	29	25	0	4	0	29			
				Kabupaten Sorong	9		9	0	0	0	0	9	9	8	1	0	0	9			
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Manokwari	118		119	1	0	0	10	118	118	107	0	10	1	119			
				Kabupaten Sorong	37	Random	37	0	0	0	1	37	37	33	4	0	0	37			
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				TOTAL	193		194	1	0	0	15	193	193	173	5	14	1	194	89.18		
		2	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Manokwari	33		Targeted	33	0	0	0	16	33	33	18	0	15	0	33		
				Kabupaten Sorong	11	11		1	0	0	5	10	10	8	0	2	0	11			
				-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Manokwari	77	77		0	0	0	23	77	77	54	0	23	0	77			
				Kabupaten Sorong	24	Random	24	2	0	0	13	22	22	14	0	8	0	24			
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				TOTAL	145		145	3	0	0	57	142	142	94	0	48	0	145	64.83		
		3	Suplemen Kesehatan	Manokwari	11		Targeted	11	0	0	0	3	11	11	8	0	3	0	11		
				Kabupaten Sorong	4	4		0	0	0	2	4	4	3	0	1	0	4			
				-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Manokwari	26	26		0	0	0	3	26	26	22	0	3	1	26			
				Kabupaten Sorong	8	Random	8	0	0	0	2	8	8	6	0	2	0	8			
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				TOTAL	49		49	0	0	0	10	49	49	39	0	9	1	49	79.59		
		4	Kosmetik	Manokwari	66		Targeted	66	0	0	0	10	66	66	59	1	6	0	66		
				Kabupaten Sorong	20	20		0	0	0	3	20	20	17	0	3	0	20			
				-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Manokwari	155	155		0	0	0	16	155	155	139	0	16	0	155			
				Kabupaten Sorong	48	Random	48	1	0	0	6	47	47	41	0	6	0	48			
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				TOTAL	289		289	1	0	0	35	288	288	256	1	31	0	289	88.58		
				Total Obat	38		Targeted	38	0	0	0	4	38	38	33	1	4	0	38	86.84	
				Total Obat Tradisional	44	44		1	0	0	21	43	43	26	0	17	0	44	59.09		
				Total Suplemen Kesehatan	15	15		0	0	0	5	15	15	11	0	4	0	15	73.33		
				Total Kosmetik	86	86		0	0	0	13	86	86	76	1	9	0	86	88.37		
				Manokwari	139	Targeted	139	0	0	0	33	139	139	110	1	28	0	139	79.14		
				Kabupaten Sorong	44		44	1	0	0	10	43	43	36	1	6	0	44	81.82		
				-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
				Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	183		183	1	0	0	43	182	182	146	2	34	0	183	79.78		
				Total Obat	155	Random	156	1	0	0	11	155	155	140	4	10	1	156	89.74		
				Total Obat Tradisional	101		101	2	0	0	36	99	99	68	0	31	0	101	67.33		
				Total Suplemen Kesehatan	34		34	0	0	0	5	34	34	28	0	5	1	34	82.35		
				Total Kosmetik	203		203	1	0	0	22	202	202	180	0	22	0	203	88.67		

			Manokwari	376	Random	377	1	0	0	52	376	376	322	0	52	2	53	0	377	85.41	
			Kabupaten Sorong	117		117	3	0	0	22	114	114	94	4	16	0	23	0	117	80.34	
			-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	493		494	4	0	0	74	490	490	416	4	68	2	76	0	494	84.21	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	676		677	5	0	0	117	672	672	562	6	102	2	112	0	677	83.01	
			Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																		
		1	Pangan	Manokwari	41	Targeted	41	0	0	0	12	41	41	29	0	12	0	12	0	41	70.73
			0	Kabupaten Sorong	9		14	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	14	100.00
			0	-		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			0	Manokwari	77		77	0	0	0	15	77	77	61	1	15	0	16	0	77	79.22
			0	Kabupaten Sorong	51		46	2	0	0	11	44	44	36	0	8	0	10	0	46	78.26
			0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2	Fortifikasi	Manokwari	70	Targeted	70	1	0	0	13	69	69	56	1	10	2	14	0	70	80.00
				Kabupaten Sorong			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				Total Fortifikasi	70		70	1	0	0	13	69	69	56	1	10	2	14	0	70	80.00
			Total Pangan		50	Targeted	55	0	0	0	12	55	55	43	0	12	0	12	0	55	78.18
			Total Pangan		128	Random	123	2	0	0	26	121	121	97	1	23	0	26	0	123	78.86
			TOTAL PANGAN		248		248	3	0	0	51	245	245	196	2	45	2	52	0	248	79.03

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2

Tabel 4.6 Indeks Kesadaran Masyarakat di Setiap Provinsi

No.	Provinsi	Capaian 2021	Target 2021	Persentase Capaian	Gap Indeks
1	DKI Jakarta	87,12	85	102,49%	2,12
2	Jawa Tengah	87,05	75	116,07%	12,05
3	Kepulauan Riau	85,12	81	105,09%	4,12
4	DI Yogyakarta	84,97	80	106,21%	4,97
5	Kalimantan Timur	83,27	84	99,13%	-0,73
6	Kalimantan Selatan	79,08	81	97,63%	-1,92
7	Jawa Barat	78,33	71	110,32%	7,33

8	Maluku	78,32	77	101,71%	1,32
9	Sulawesi Utara	78,15	81	96,48%	-2,85
10	Riau	78,13	78	100,17%	0,13
11	Gorontalo	78,01	82	95,13%	-3,99
12	Kalimantan Barat	77,95	81	96,23%	-3,05
13	Bengkulu	77,62	86	90,26%	-8,38
14	Jambi	77,54	75	103,39%	2,54
15	Kalimantan Utara	77,42	-	-	-
16	Sumatera Selatan	76,47	81	94,41%	-4,53
17	Bali	76,28	72	105,94%	4,28
18	Papua Barat	75,27	82	91,79%	-6,73
19	Aceh	75,21	75	100,28%	0,21
20	Sulawesi Tenggara	74,77	75	99,69%	-0,23
21	Kalimantan Tengah	74,69	71	105,20%	3,69
22	Sulawesi Tengah	74,34	78	95,31%	-3,66
23	Sumatera Barat	74,28	84	88,43%	-9,72
24	Banten	74,26	89	83,44%	-14,74
25	Sulawesi Selatan	74,11	79	93,81%	-4,89
26	Sumatera Utara	74,07	81	91,44%	-6,93
27	Jawa Timur	73,36	76	96,53%	-2,64
28	Papua	72,57	64	113,39%	8,57
29	Nusa Tenggara Timur	72,11	71	101,56%	1,11
30	Kepulauan Bangka Belitung	71,56	77	92,94%	-5,44
31	Lampung	71,2	85	83,76%	-13,8
32	Sulawesi Barat	67,81	68	99,72%	-0,19
33	Nusa Tenggara Barat	66,83	77	86,79%	-10,17
34	Maluku Utara	65,31	74	88,26%	-8,69
	Nasional	77,84	77	100,83%	0,84

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 3

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No	Unit Penyelenggara KBP	Jml KBP	Respon den	Capaian Indeks	Target	Persen Capaian	Gap Indeks	Total skor
13	BBPOM di Banjarmasin	7	56	92.3	91.1	101.4%	1.2	8
14	BBPOM di Denpasar	16	193	85.8	90.7	94.6%	-4.9	8
15	BBPOM di Padang	4	58	85.4	82.7	103.3%	2.7	8
16	BPOM di Gorontalo	5	34	96.5	85.6	112.7%	10.9	8
17	BPOM di Kupang	8	53	90.7	90.2	100.6%	0.5	8
18	BPOM di Mamuju	5	38	93.4	91.1	102.5%	2.3	8
19	BBPOM di Palembang	8	193	83.5	88.8	94.0%	-5.3	7
20	BPOM di Batam	4	67	88.8	88.0	100.9%	0.8	7
21	BBPOM di Jayapura	5	37	90.2	91.1	99.1%	-0.9	6
22	BBPOM di Pontianak	6	42	91.0	91.1	99.9%	-0.1	6
23	BPOM di Jambi	3	21	91.0	87.8	103.7%	3.2	6
24	BPOM di Kendari	3	21	85.5	80.3	106.5%	5.2	6
25	BBPOM di Mataram	6	100	85.1	87.6	97.2%	-2.5	5
26	BBPOM di Medan	6	80	82.6	91.1	90.7%	-8.5	5
27	BBPOM di Palangkaraya	4	31	82.1	88.7	92.5%	-6.6	5
28	BPOM di Bengkulu	4	41	88.8	91.1	97.5%	-2.3	5
29	BPOM di Palu	4	53	82.5	90.0	91.7%	-7.5	5
30	BPOM di Manokwari	4	30	75.8	87.2	87.0%	-11.4	4
31	BPOM di Pangkalpinang	2	37	84.5	91.1	92.8%	-6.6	4
32	BBPOM di Manado	1	17	85.6	89.9	95.2%	-4.3	3
33	BPOM di Sofifi	3	23	83.1	91.1	91.2%	-8.0	3

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 4.17 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM per provinsi berdasarkan persentase capaian

No.	Provinsi	Capaian Indeks	Target Indeks	Persentase Capaian	Gap Indeks
1	Gorontalo	77,43	64,53	119,99%	12,9
2	Kalimantan Tengah	68,17	63,25	108,36%	5,92
3	Jambi	76,31	70,38	108,43%	5,93
4	Kepulauan Riau	74,65	70,27	106,23%	4,38
5	Nusa Tenggara Timur	70,01	68,12	102,77%	1,89
6	Jawa Tengah	72,56	70,73	102,59%	1,83
7	Kalimantan Barat	69,52	68,07	102,13%	1,45
8	Riau	65,14	64,28	101,34%	0,86
9	Papua Barat	68,87	68,53	100,50%	0,34
10	Kalimantan Timur	72,18	72,55	99,35%	-0,47
11	Aceh	70,16	70,84	99,04%	-0,68
12	DKI Jakarta	73,8	74,98	98,43%	-1,18
13	Sulawesi Tenggara	67,2	68,36	98,30%	-1,16
14	Maluku	68,02	69,86	97,37%	-1,84

15	Kepulauan Bangka Belitung	69,06	71,03	97,23%	-1,97
16	Sulawesi Tengah	65,65	67,56	97,17%	-1,91
17	Bali	68,09	70,56	96,50%	-2,47
18	Maluku Utara	59,95	62,55	95,84%	-2,6
19	Papua	61,7	64,76	95,27%	-3,06
20	Sumatera Selatan	71,83	75,68	94,91%	-3,85
21	Sulawesi Selatan	70,84	75,5	93,83%	-4,66
22	Kalimantan Selatan	73,03	78,33	93,23%	-5,3
23	Sumatera Barat	67,93	73,87	91,96%	-5,94
24	Bengkulu	71,51	78,38	91,24%	-6,87
25	Sumatera Utara	64,67	71	91,08%	-6,33
26	Jawa Barat	69,12	77,83	88,81%	-8,71
27	Kalimantan Utara	69,37	-	-	-
28	Jawa Timur	66,55	75,64	87,98%	-9,09
29	Lampung	66,78	79,54	83,96%	-12,76
30	Sulawesi Utara	69,7	83,37	83,60%	-13,67
31	Banten	67,69	81,07	83,50%	-13,38
32	Sulawesi Barat	61,5	74	83,11%	-12,5
33	DI Yogyakarta	64,71	78,17	82,78%	-13,46
34	Nusa Tenggara Barat	61,64	76,24	80,85%	-14,6
	Nasional	68,88	74	93,08%	-5,11

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

NO	Unit Pelayanan	2020	2021	Naik/ Turun	Target 2021	Persentase Pencapaian Target	Tercapai/ Tidak tercapai terhadap target
58	Balai Besar POM Di Denpasar	89,28	89,56	0,28	90,00	99,51	Tidak Tercapai
59	Balai Besar POM Di Banda Aceh	93,44	94,43	0,99	95,00	99,40	Tidak Tercapai
60	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	-	79,32	-	80,00	99,15	Tidak Tercapai
61	Loka POM di Kota Palopo	-	87,27	-	89,00	98,06	Tidak Tercapai
62	Loka POM di Kota Tarakan	-	85,26	-	87,00	98,00	Tidak Tercapai
63	Balai POM Di Sofifi	90,43	88,73	-1,70	91,00	97,51	Tidak Tercapai
64	Balai POM Di Bengkulu	92,14	90,53	-1,61	94,00	96,31	Tidak Tercapai
65	Loka POM di Kota Baubau	-	83,42	-	89,00	93,73	Tidak Tercapai
66	Balai POM Di Ambon	94,99	89,48	-5,51	95,50	93,70	Tidak Tercapai
67	Balai POM Di Manokwari	99,09	92,28	-6,81	99,00	93,21	Tidak Tercapai

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 4

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Manokwari	126	146	
			Kabupaten Sorong	69	69	
			-			
			TOTAL	195	215	90.70
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Manokwari	7	8	
			Kabupaten Sorong	4	4	
			-			
			TOTAL	11	12	91.67
		Suplemen Kesehatan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Manokwari	25	25	
			Kabupaten Sorong	12	12	
			-			
			TOTAL	37	37	100.00
		Pangan	Manokwari	88	88	
			Kabupaten Sorong	32	32	
			-			
			TOTAL	120	120	100.00
			Manokwari	246	267	92.13
			Kabupaten Sorong	117	117	100.00
			-	0	0	0
			Total	363	384	94.53

2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
			Manokwari	0	0	0
			Kabupaten Sorong	0	0	0
			-	0	0	0
			Total	0	0	0

3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
			Manokwari	0	0	0
			Kabupaten Sorong	0	0	0
			-	0	0	0
			Total	0	0	0

4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
			Manokwari	0	0	0
			Kabupaten Sorong	0	0	0
			-	0	0	0
			Total	0	0	0
TOTAL			Manokwari	246	267	92.13
			Kabupaten Sorong	117	117	100.00
			-	0	0	#DIV/0!
			total	363	384	94.53

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	RAPK s,d TW IV (Jan - Des)		
				TL (pembilang)	Rekomendas i (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomend asi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Manokwari	81	228	
			Kabupaten Sorong	37	69	
			-			
			TOTAL	118	297	39.73
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Manokwari	9	10	
			Kabupaten Sorong	1	4	
			-			
			TOTAL	10	14	71.43
		Suplemen Kesehatan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Manokwari	25	25	
			Kabupaten Sorong	4	12	
			-			
			TOTAL	29	37	78.38
		Pangan	Manokwari	69	78	
			Kabupaten Sorong	19	27	
			-			
			TOTAL	88	105	83.81
			Manokwari	184	341	53.96
			Kabupaten Sorong	61	112	54.46
			-	0	0	0
			Total	245	453	54.08

2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Manokwari	21	63	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	21	63	33.33
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Manokwari	0	0	
			Kabupaten Sorong	0	0	
			-			
			TOTAL	0	0	0
			Manokwari	21	63	33.33
			Kabupaten Sorong	0	0	0
			-	0	0	0
			Total	21	63	33.33
TOTAL			Manokwari	205	404	43.65
			Kabupaten Sorong	61	112	54.46
			-	0	0	#DIV/0!
			total	266	516	43.71

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
				Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Manokwari	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Manokwari	0	0	0
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Manokwari	5	10	50.00
			Kabupaten Sorong	3	3	100.00
			-			0
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Manokwari	163	163	100.00
			Kabupaten Sorong	0	0	0
			-			0
Total			Manokwari	168	173	97.11
			Kabupaten Sorong	3	3	100.00
			-	0	0	0
			Total	171	176	97.16

No	Sarana Produksi	UPT	RAPK s,d, TW 4 (Jan - Des)			
			Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biolog/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		-	0			0
		TOTAL	0	0	0	0
11	Industri Pangan	Manokwari	28	14	14	50.00
		Kabupaten Sorong	6	6	0	100.00
		-	0			0
		TOTAL	34	20	14	58.82
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Manokwari	27	14	13	51.85
		Kabupaten Sorong	10	4	6	40.00
		-	0			0
		TOTAL	37	18	19	48.65
	Manokwari		55	28	27	50.91
	Kabupaten Sorong		16	10	6	62.50
	-		0	0	0	0
	TOTAL		71	38	33	53.52

No	Sarana Distribusi	UPT	RAPK s,d, TW 4 (Jan - Des)			
			Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Manokwari	6	5	1	83.33
		Kabupaten Sorong	10	10	0	100.00
		-	0			0
		TOTAL	16	15	1	93.75
2	Apotek	Manokwari	121	111	10	90.98
		Kabupaten Sorong	13	12	1	92.31
		-	0			0
		TOTAL	134	123	11	91.11
3	Toko Obat	Manokwari	1	0	1	0.00
		Kabupaten Sorong	4	3	1	75.00
		-	0			0
		TOTAL	5	3	2	60.00
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Manokwari	7	7	0	100.00
		Kabupaten Sorong	4	4	0	100.00
		-	0			0
		TOTAL	11	11	0	100.00
5	Rumah Sakit (RS)	Manokwari	11	10	1	100.00
		Kabupaten Sorong	6	4	2	66.67
		-	0			0
		TOTAL	17	14	3	87.50
6	Puskemas	Manokwari	69	69	0	100.00
		Kabupaten Sorong	34	32	2	94.12

		-	0			0
		TOTAL	103	101	2	98.04
7	Klinik	Manokwari	6	6	0	100.00
		Kabupaten Sorong	5	4	1	80.00
		TOTAL	11	10	1	90.00
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Manokwari	0	0	0	0
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Manokwari	10	2	8	20.00
		Kabupaten Sorong	9	5	4	55.56
		TOTAL	19	7	12	36.84
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Manokwari	3	3	0	100.00
		Kabupaten Sorong	0	0	0	0
		TOTAL	3	3	0	100.00
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Manokwari	50	25	25	50.00
		Kabupaten Sorong	13	2	11	15.38
		TOTAL	63	27	36	42.86
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Manokwari	267	209	58	78.28
		Kabupaten Sorong	44	23	21	52.27
		-	0			0
		TOTAL	311	232	79	74.60
	Manokwari		551	447	104	81.06
	Kabupaten Sorong		142	99	43	69.72
	-		0	0	0	0
	TOTAL		693	546	147	78.79

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM
TAHUN 2021

No	Unit Pelayanan Publik	IPP Tahun 2020	Rincian Hasil IPP Tahun 2021							Target IPP Tahun 2021	Selisih Nilai
			Aspek I Kebijakan	Aspek II SDM	Aspek III Sarana Prasarana	Aspek IV Sistem Informasi	Aspek V Konsultasi	Aspek VI Inovasi	IPP 2021		
1	Balai Besar POM di Denpasar	4,52	4,95	5,00	4,98	5,00	5,00	0,35	4,66	4,55	0,11
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,56	4,88	4,98	4,98	4,99	4,99	0,35	4,63	4,60	0,03
3	Biro Hukum dan Organisasi	4,48	4,90	4,96	4,82	4,89	4,94	0,35	4,59	4,51	0,08
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,29	4,90	4,81	4,93	4,82	5,00	0,35	4,57	4,40	0,17
5	Balai Besar POM di Jakarta	4,00	4,87	4,65	4,94	4,86	4,97	0,35	4,54	4,20	0,34
6	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,33	4,72	4,86	4,97	4,71	5,00	0,35	4,52	4,45	0,07
7	Balai Besar POM di Surabaya	4,11	4,86	4,85	4,97	4,92	4,53	0,35	4,52	4,35	0,17
8	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan	4,35	4,89	4,65	4,99	4,85	4,7	0,35	4,51	4,45	0,06
9	Balai Besar POM di Serang	4,25	4,86	4,55	4,79	4,93	4,93	0,32	4,5	4,35	0,15
10	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,17	4,77	4,87	4,78	4,79	4,89	0,35	4,5	4,35	0,15
11	Balai Besar POM di Bandung	4,20	4,83	4,89	4,85	4,93	4,47	0,21	4,48	4,35	0,13
12	Balai POM di Ambon	4,22	4,75	4,81	4,88	4,88	4,55	0,32	4,46	4,35	0,11
13	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,10	4,77	4,92	5,00	4,95	4,15	0,28	4,45	4,20	0,25
14	Balai Besar POM di Samarinda	4,21	4,72	4,67	5	4,82	4,55	0,32	4,44	4,35	0,09
15	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3,98	4,61	4,87	4,75	4,86	4,75	0,32	4,44	4,20	0,24
16	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,80	4,79	4,55	4,83	4,86	4,72	0,35	4,44	4,01	0,43
17	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,21	4,44	4,88	4,86	4,82	4,96	0,28	4,43	4,35	0,08
18	Balai Besar POM di Mataram	4,31	4,81	4,99	4,69	4,91	4,14	0,25	4,42	4,45	-0,03
19	Balai Besar POM di Padang	4,21	4,58	4,77	4,87	4,9	4,7	0,28	4,42	4,35	0,07
20	Balai POM di Bengkulu	4,29	4,84	4,65	5,00	4,76	4,23	0,35	4,41	4,40	0,01
21	Balai POM di Pangkal Pinang	3,95	4,55	4,73	4,86	4,82	4,68	0,21	4,39	4,20	0,19
22	Balai Besar POM di Manado	3,91	4,78	4,81	4,9	4,6	4,2	0,28	4,38	4,20	0,18
23	Balai Besar POM di Semarang	4,14	4,65	4,82	4,81	4,92	4,20	0,28	4,37	4,35	0,02
24	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,26	4,45	4,62	4,80	4,91	4,79	0,28	4,36	4,40	-0,04
25	Balai Besar POM di Makassar	3,95	4,62	4,78	4,83	4,45	4,71	0,07	4,35	4,20	0,15
26	Balai POM di Mamuju	3,49	4,78	4,36	4,63	4,68	4,76	0,28	4,35	3,75	0,60
27	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3,97	4,62	4,44	4,89	4,83	4,48	0,35	4,34	4,20	0,14
28	Balai Besar POM di Palangka Raya	3,52	4,54	4,52	4,89	4,83	4,58	0,21	4,34	3,75	0,59
29	Balai Besar POM di Jayapura	4,08	4,49	4,92	4,68	4,77	4,49	0,07	4,33	4,20	0,13
30	Balai POM di Jambi	3,51	4,54	4,86	5	4,79	3,94	0,32	4,32	3,75	0,57
31	Balai POM di Gorontalo	3,96	4,62	4,65	4,65	4,68	4,40	0,35	4,31	4,20	0,11
32	Balai Besar POM di Palembang	3,80	4,57	4,90	4,82	4,93	3,55	0,35	4,27	4,01	0,26
33	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,89	4,81	4,73	4,75	4,6	3,63	0,28	4,26	4,01	0,25
34	Balai Besar POM di Pontianak	3,83	4,39	4,7	4,49	4,72	4,6	0,21	4,25	4,01	0,24
35	Balai POM di Sofifi	3,86	4,26	4,36	4,73	4,86	4,68	0,21	4,22	4,01	0,21
36	Balai POM di Palu	4,02	4,40	4,15	4,97	4,90	4,18	0,21	4,19	4,20	-0,01
37	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,24	4,05	4,88	4,85	4,23	4,44	0,28	4,14	4,35	-0,21
38	Balai POM di Kupang	3,95	4,51	4,16	4,34	4,49	4,67	0,07	4,13	4,20	-0,07
39	Balai POM di Batam	3,91	4,39	3,91	4,73	4,40	4,74	0,25	4,12	4,20	-0,08
40	Balai POM di Manokwari	4,38	4,28	4,35	4,78	4,72	4,00	0,21	4,11	4,45	-0,34
41	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,90	4,63	4,01	4,97	4,62	3,46	0,21	4,08	4,01	0,07
42	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,24	3,93	4,22	4,97	4,59	4,47	0,35	4,07	4,35	-0,28
43	Balai POM di Kendari	3,79	4,27	4,31	4,43	4,74	3,75	0,25	4,01	4,01	0,00
44	Direktorat Registrasi Obat	3,79	4,08	4,61	4,92	4,14	3,8	0,07	3,99	4,01	-0,02
45	Balai Besar POM di Banjarmasin	3,69	3,76	4,57	4,18	4,77	4,37	0,35	3,98	3,75	0,23
46	Balai Besar POM di Medan	3,84	4,11	3,99	4,62	4,45	3,9	0,25	3,92	4,01	-0,09
47	Balai Besar POM di Banda Aceh	3,54	3,73	4,38	4,1	4,37	3,72	0,28	3,76	3,75	0,01
48	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	-	3,8	4,65	4,89	1,83	3,74	0,28	3,57	-	

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 5

LAMPIRAN 2
INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM
TRIWULAN 4 TAHUN 2021

	Jumlah Responden	Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	INDEKS EFF KIE
Unit Pelaksana Teknis	15235		91,80	94,50	94,70	88,62	93,32
REGIONAL SUMATERA	7794		92,56	94,25	95,46	89,54	93,82
Balai Besar POM Banda Aceh	556	90	91,98	93,38	94,6	89,79	93,18
Balai Besar POM Bandar Lampung	349	94,5	91,62	94,21	95,63	86,96	93,35
Balai Besar POM Medan	1845	94	94,67	94,67	95,45	91,11	94,41
Balai Besar POM Padang	1411	94	91,34	91,88	94,29	87,4	92,15
Balai Besar POM Palembang	206	94	95,84	97,58	97,82	92,23	96,6
Balai Besar POM Pekanbaru	542	93	91,68	94,01	95,34	90,04	93,7
Balai POM Batam	798	90	93,5	91,76	96,9	90,6	94,04
Balai POM Bengkulu	458	92	92,84	97,33	94,98	91,59	94,85
Balai POM Jambi	1003	94	91,46	94,49	94,69	88,66	93,28
Balai POM Pangkal Pinang	626	92	90,62	93,16	94,89	87,02	92,63
REGIONAL JAWA	3083		89,97	93,32	94,45	86,41	92,32
Balai Besar POM Bandung	831	92	89,96	90,66	94,31	85,53	91,35
Balai Besar POM Jakarta	273	93	91,16	97,76	94,41	87,36	93,83
Balai Besar POM Semarang	371	91,5	89,62	92,75	95,28	86,46	92,5
Balai Besar POM Serang	772	90,5	89,54	93,39	93,1	86,79	91,75
Balai Besar POM Surabaya	383	91,1	88,32	91,72	93,67	87,34	91,51
Balai Besar POM Yogyakarta	453	92	91,19	93,66	95,92	84,99	92,95
REGIONAL BALI NUSRA	3300		91,81	94,01	94,02	87,17	92,63
Balai Besar POM Denpasar	858	95	91,6	93,42	94,29	84,7	92,14
Balai Besar POM Mataram	1327	93,5	93,34	95,71	93,91	88,62	93,46
Balai POM Kupang	1115	93	90,48	92,9	93,86	88,18	92,28
REGIONAL KALIMANTAN	2971		89,79	93,71	93,08	84,96	91,54
Balai Besar POM Banjarmasin	1013	90	90,73	93	94,4	86,5	92,29
Balai Besar POM Palangkaraya	511	92	91,28	93,73	95,01	84,44	92,47
Balai Besar POM Pontianak	639	90,1	84,43	96,74	86,31	83,53	88,58
Balai Besar POM Samarinda	586	92,7	90,08	92,78	93,94	87,33	92,1
Balai POM Tarakan	222	90,5	92,44	92,3	95,72	83	92,26
REGIONAL SULAM PAPUA	5040		93,15	95,97	95,38	90,41	94,48
Balai Besar POM Jayapura	339	90,5	92,38	93,8	94,76	89,23	93,31
Balai Besar POM Makassar	410	92	91,82	94,26	94,27	87,38	92,85
Balai Besar POM Manado	1165	92	87,1	98,27	89,14	85,54	90,89
Balai POM Ambon	271	94	93,58	97,47	95,48	91,51	95,17
Balai POM Gorontalo	235	97	97,85	98,39	99,26	93,3	97,85
Balai POM Kendari	733	93,5	92,63	94,28	95,94	89,63	94,07
Balai POM Mamuju	224	89,5	95,18	95,99	97,32	92,63	95,93
Balai POM Manokwari	662	88,5	95,38	98,91	97,13	95,54	97,19
Balai POM Palu	541	92	90,98	92,42	94,45	89,37	92,67
Balai POM Sofifi	460	92,5	94,61	95,94	96,03	89,95	94,82

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)												Total progres
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Manokwari	1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2 Sosialisasi keamanan pangan	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	4 Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	7.61	0.00	0.00	0.00	10.00
	5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	3.47	0.00	0.00	0.00	5.00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	6.95	0.00	0.00	0.00	10.00
	6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	0.00	25.00
	7 Pengawalan	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total skor (Tahun N)		100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00	8.50	11.50	0.00	6.97	18.03	25.00	10.00	0.00	100.00

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)												Total
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Manokwari	1 Adokasi Kelembagaan Desa	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2 Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	4 Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	8.57	4.29	0.00	0.00	15.00
	5 Fasilitasi Keamanan Pangan	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.86	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	7 Monitoring dan Evaluasi	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	8 Pengawasan tahun sebelumnya	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Total		100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	20.00	7.77	12.23	0.00	9.14	26.57	9.29	15.00	0.00	100.00

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)												Total
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Manokwari	1 Adokasi	20.00	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2 Survey Pasar	5.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	5 Penyuluhan	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	1.67	0.00	0.00	5.00
	6 Kampanye	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	1.67	0.00	0.00	5.00
	7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	0.00	20.00
	8 Lomba Pasar Aman	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	Total	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.75	26.25	0.00	0.00	21.66	8.34	0.00	10.00	100.00

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 6

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				
s,d TW IV (Jan - Des)				
Sampel diperiksa sesuai standar (sampel yg disampling dan diperiksa sesuai target DIPA balai)	Sampel diuji sesuai standar (seluruh sampel yang diuji oleh balai termasuk sampel dari loka mandiri)	Target sampel yang diperiksa 1 tahun (sesuai target sampel yang disampling & diperiksa pada DIPA balai)	Sampel masuk ke lab (setelah dikurangi sampel TIE, rusak, kadaluarsa) (termasuk loka satker mandiri apabila sampel masih diuji oleh balai koordinator)	%
677	473	676	672	85.27

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar				
s,d TW I (Jan - Mar)				
Sampel diperiksa sesuai standar (sampel yg disampling dan diperiksa sesuai target DIPA balai)	Sampel diuji sesuai standar (seluruh sampel yang diuji oleh balai termasuk sampel dari loka mandiri)	Target sampel yang diperiksa 1 tahun (sesuai target sampel yang disampling & diperiksa pada DIPA balai)	Target sampel yang diuji 1 tahun (termasuk loka satker mandiri apabila sampel masih diuji oleh balai koordinator)	%
71	70	248	248.00	28.43

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 7

UPT	Tahapan	s,d TW IV (Jan - Des)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara							
Manokwari	SPDP	3	0			1.00		0.15	15.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Tahap I					1.00	0.00	0.4	40.00%			
	P21					1.00	0.00	0.3	30.00%			
	Tahap II			3		1.00	0.00	0.15	15.00%			
	Total	3	0	3	0							
Kabupaten Sorong	SPDP	1	0			1.00		0.15	15.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Tahap I					1.00	0.00	0.4	40.00%			
	P21					1.00	0.00	0.3	30.00%			
	Tahap II			1		1.00	0.00	0.15	15.00%			
	Total	1	0	1	0							
-	SPDP		0			0		0.15	0.00%	0.00%	0	0.00%
	Tahap I					0	0	0.4	0%			
	P21					0	0	0.3	0%			
	Tahap II					0	0	0.15	0%			
	Total	0	0	0	0							
TOTAL	SPDP	4	0	0		1.00		0.15	15.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Tahap I			0	0	1.00	0.00	0.4	40.00%			
	P21			0	0	1.00	0.00	0.3	30.00%			
	Tahap II			4	0	1.00	0.00	0.15	15.00%			
	Total	4	0	4	0				0%			

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 8

INDEKS RB BALAI POM DI MANOKWARI

No	Unit Kerja	Nilai Konversi
1	BBPOM di Denpasar	86,2
2	BBPOM di Semarang	85,97
3	BBPOM di Yogyakarta	85,49
4	BBPOM di Pontianak	84,87
5	BBPOM di Jayapura	84,76
6	BBPOM di Surabaya	84,65
7	BBPOM di Manado	83,89
8	BBPOM di Mataram	83,64
9	BPOM di Ambon	83,51
10	BBPOM di Bandar Lampung	83,46
11	BBPOM di Palangkaraya	83,22
12	BBPOM di Padang	83,17
13	BBPOM di Serang	83,06
14	BBPOM di Palembang	82,94
15	BBPOM di Bandung	82,76
16	BPOM di Pangkal pinang	82,67
17	BPOM di Palu	82,58
18	BBPOM di Jakarta	82,4
19	BPOM di Batam	81,81
No	Unit Kerja	Nilai Konversi
20	BPOM di Bengkulu	81,52
21	BPOM di Manokwari	81,02
22	BBPOM di Banjarmasin	80,76
23	BBPOM di Samarinda	80,14

24	BPOM di Gorontalo	79,73
25	BBPOM di Banda Aceh	79,19
26	BPOM di Kendari	78,49
27	BBPOM di Pekanbaru	78,09
28	BBPOM di Makassar	77,81
29	BPOM di Jambi	76,44
30	BPOM di Kupang	74,79
31	BBPOM di Medan	70,27
32	BPOM di Sofifi	70,26
33	BPOM di Mamuju	64,02

NILAI AKIP BALAI POM DI MANOKWARI

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,29	25,93
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,31	19,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,07	12,76
d.	Evaluasi Internal	10	5,29	5,79
e.	Capaian Kinerja	20	13,72	11,71
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,68	75,56
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 9

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 10

LAPORAN RINGKAS PENILAIAN KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja: Balai POM di Manokwari
Tanggal Penilaian: 20 Desember 2021
Nama Tim Penilai: 1. Rina Azhariyati
2. Sitoresmi Triwibowo
Hasil Penilaian:

No	Bidang/ Laboratorium	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)
1	Obat dan Nappza	50.33	76.35	59.40
2	Pangan	77.00		
3	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	73.73		
4	Kosmetik	79.30		
Rata-rata Kimia		70.09	76.35	59.40
5	Mikrobiologi	65.83	75.90	60.33
Rata-Rata Nilai Pemenuhan (%)		67.96	76.13	59.87
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium		67.98		

Kendala Pemenuhan:

Pemenuhan SRL

- Keterbatasan sediaan obat dan OTSK di Manokwari menyulitkan peningkatan SRL di Lab. Obat
- Ada beberapa baku pembandingan yg direncanakan utk peningkatan SRL ternyata belum datang sampai di akhir tahun sehingga direncanakan dialihkan untuk tahun 2022.
- Adanya hambatan terkait kerusakan alat sehingga menghambat kinerja pengujian rutin maupun penambahan SRL

Pemenuhan Standar Kompetensi

- Masih ada SDM (Koordinator, penguji di Lab. Obat, Kosmetik, OTSK dan Pangan) yang belum memenuhi target secara individual karena sebagai SDM yang baru masuk ke kelompok substansi pengujian memerlukan waktu untuk meningkatkan kompetensi.
- Adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan kegiatan magang tidak dapat dilaksanakan.

Pemenuhan Standar Peralatan

- Adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan pembatalan pembelian beberapa peralatan / instrumen (vacuum manifold set dan lemari reagen / chemical storage)

Rencana Tindak Lanjut:

- Penambahan Standar Ruang Lingkup dapat dilakukan melalui pembelian secara online terhadap sampel yang tidak dapat ditemukan di Papua Barat
- Melaksanakan Pelatihan/Bimtek/Magang secara online/offline untuk peningkatan kompetensi bekerja sama dengan P3OMN atau institusi lain yang sesuai.
- Penyesuaian rencana pembelian alat / instrumen terhadap Standar Peralatan terbaru BPOM sehingga dapat memenuhi kebutuhan peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Tim Penilai



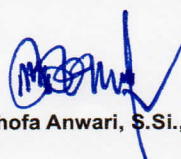
1. Rina Azhariyati

Tim Penilai



2. Sitoresmi Triwibowo

Kepala Balai POM di Manokwari



3. Musthofa Anwari, S.Si., Apt

Perhitungan Indeks UPT

Periode : Triwulan I-IV

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai i i = c + h / 2
		SIPT (a)	SPIMKer (b)	c = a + b	Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)	h = d+e+f+g/4	
		80%	20%							
1	Balai Besar POM di Semarang	2,4	0,6	3	2	3	1	2	2	2,50
2	Balai Besar POM di Surabaya	1,6	0,6	2,2	3	2	3	3	2,75	2,48
3	Balai Besar POM di Jakarta	1,6	0,6	2,2	3	3	2	3	2,75	2,48
4	Balai Besar POM di Manado	1,6	0,6	2,2	2	2	3	3	2,5	2,35
5	Balai POM di Palu	1,6	0,6	2,2	1	3	2	3	2,25	2,22
6	Balai Besar POM di Padang	0,8	0,6	1,4	3	3	3	3	3	2,20
7	Balai Besar POM di Palangka Raya	0,8	0,4	1,2	3	3	3	3	3	2,10
8	Balai Besar POM di Jayapura	1,6	0,2	1,8	2	2	2	3	2,25	2,02
9	Balai Besar POM di Banjarmasin	1,6	0,2	1,8	2	3	1	3	2,25	2,02
10	Balai Besar POM di Samarinda	1,6	0,4	2	2	3	0	3	2	2,00
11	Balai Besar POM di Pekanbaru	1,6	0,4	2	2	3	0	3	2	2,00
12	Balai Besar POM di Palembang	0,8	0,6	1,4	3	3	2	2	2,5	1,95
13	Balai POM di Sofifi	2,4	0,4	2,8	1	1	0	2	1	1,90
14	Balai POM di Kendari	1,6	0,4	2	1	3	0	3	1,75	1,88
15	Balai POM di Bengkulu	1,6	0,4	2	1	3	0	3	1,75	1,88
16	Balai Besar POM di Denpasar	1,6	0,6	2,2	1	3	0	2	1,5	1,85
17	Balai POM di Pangkal Pinang	0,8	0,6	1,4	3	3	0	3	2,25	1,82
18	Balai Besar POM di Serang	0,8	0,6	1,4	1	3	2	3	2,25	1,82
19	Balai Besar POM di Yogyakarta	1,6	0,2	1,8	1	3	0	3	1,75	1,78
20	Balai Besar POM di Mataram	0,8	0	0,8	2	3	3	3	2,75	1,78
21	Balai Besar POM di Medan	1,6	0,2	1,8	2	1	0	3	1,5	1,65
22	Balai Besar POM di Banda Aceh	1,6	0,2	1,8	1	2	0	3	1,5	1,65
23	Balai Besar POM di Makassar	1,6	0,4	2	1	2	0	2	1,25	1,62
24	Balai POM di Ambon	0,8	0,4	1,2	2	3	0	3	2	1,60
25	Balai POM di Manokwari	0,8	0,2	1	2	3	0	3	2	1,50
26	Balai Besar POM di Pontianak	0,8	0,4	1,2	1	3	0	3	1,75	1,48
27	Balai Besar POM di Bandung	0,8	0,6	1,4	2	2	0	2	1,5	1,45
28	Balai POM di Mamuju	1,6	0	1,6	2	1	2	0	1,25	1,42
29	Balai POM di Batam	0,8	0,4	1,2	2	3	0	1	1,5	1,35

30	Balai POM di Kupang	0,8	0,4	1,2	2	2	0	1	1,25	1,23
31	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0,8	0,2	1	1	1	0	3	1,25	1,12
32	Balai POM di Jambi	0,8	0,2	1	1	1	0	2	1	1,00
33	Balai POM di Gorontalo	0,8	0,4	1,2	1	1	0	0	0,5	0,85
34	Balai POM di Tarakan	0	0	0	0	1	0	0	0,25	0,12

LAMPIRAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 11

EKA DAN IKPA BALAI POM DI MANOKWARI TAHUN 2021

